

**OPTIMALISASI KINERJA SATUAN INTELKAM MELALUI
DETEKSI DINI GUNA MENCEGAH KONFLIK ANTAR
PERGURUAN SILAT DI WILAYAH HUKUM POLRES
KARANGANYAR**



TUGAS AKHIR

**Diajukan untuk Melengkapi
Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Terapan Ilmu Kepolisian (S. Tr.K)**

Oleh:

HARI CAHYO PURNOMO

NO. AK 19.224

AKADEMI KEPOLISIAN

SEMARANG

2023

ABSTRAK

OPTIMALISASI KINERJA SATUAN INTELKAM MELALUI DETEKSI DINI GUNA MENCEGAH KONFLIK ANTAR PERGURUAN SILAT DI WILAYAH HUKUM POLRES KARANGANYAR

Hari Cahyo Purnomo, 19.224, hrchyo08@gmail.com

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya kasus Perguruan Pencak Silat di Wilayah Kabupaten Karanganyar. Kasus Perguruan Pencak Silat bukan menjadi kasus yang baru di Wilayah Karanganyar. Maraknya kasus tersebut menjadi atensi khusus dari Polres Karanganyar karena tidak hanya berdampak pada kerugian material namun mengakibatkan korban jiwa. Oleh karena itu, guna menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif perlu dilakukan pencegahan konflik antar Perguruan Pencak Silat. Pencegahan akan dilakukan melalui optimalisasi kinerja satuan intelkam melalui deteksi dini.

Teori yang digunakan untuk menganalisis adalah teori manajemen fungsi dan manajemen konflik. Konsep yang digunakan sebagai landasan teori, yaitu konsep optimalisasi dan penyelidikan intelijen. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan deskriptif analisis untuk mengolah data yang didapatkan di lapangan. Sumber informasi yang didapat dari sumber data primer dan sekunder. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah teknik wawancara, observasi dan studi dokumen.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan kinerja Satintelkam Polres Karanganyar dinilai belum maksimal dengan masih terjadinya konflik perguruan pencak silat di wilayah Kabupaten Karanganyar. Serta, masih kurangnya pembuatan produk dan pengarsipan dari Satintelkam Polres Karanganyar. Dalam pencegahan dan penyelesaian konflik yang telah dilakukan juga masih belum efektif sehingga perlunya inovasi baru yang lebih baik agar konflik perguruan pencak silat dapat teratasi.

Penelitian ini memberikan beberapa saran yang dapat dilakukan oleh Satintelkam, diantaranya yaitu menyusun administrasi intelejin dengan sistematis dan perlunya meningkatkan koordinasi antar instansi yang terkait dengan pihak Polri baik di dalam maupun di luar Wilayah Kabupaten Karanganyar.

Kata kunci: Optimalisasi, Deteksi Dini, Konflik Perguruan Pencak Silat.

ABSTRACT

OPTIMIZATION THE POLICE INTELLIGENCE UNIT PERFORMANCE OF EARLY DETECTION TO PREVENT CONFLICT BETWEEN ORGANIZATION PENCAK SILAT AT KARANGANYAR POLICE REGION

Hari Cahyo Purnomo, 19.224, hrchyo2gmail.com

This research is motivated by the case of the Pencak Silat Organization in the Karanganyar Regency Region. The Pencak Silat Organization case is not a new case in the Karanganyar Region. The rise of this case has received special attention from the Karanganyar Police because it not only has an impact on material losses but has resulted in fatalities. Therefore, in order to create a conducive Kamtibmas situation, it is necessary to prevent conflicts between Pencak Silat Organization. Prevention will be carried out through optimizing the performance of the intelligence unit through early detection.

The theory used to analyze is the theory of function management and conflict management. The concept used as a theoretical basis, namely the concept of optimization and intelligence investigation. The approach used in this study is a qualitative approach with descriptive analysis to process the data obtained in the field. Sources of information obtained from primary and secondary data sources. The data collection techniques used were interviews, observation and document studies.

Based on the results of research conducted by the Karanganyar Police, the performance of the Satintelkam Police is considered to be not optimal with the occurrence of pencak silat organization conflicts in the Karanganyar Regency area. As well as, there is still a lack of product manufacture and filing from the Karanganyar Police's Satintelkam. In preventing and resolving conflicts that have been carried out, they are still not effective so that new, better innovations are needed so that the conflicts in pencak silat organization can be resolved.

This study provides several suggestions that can be made by Satintelkam, including preparing intelligence administration in a systematic manner and the need to improve coordination between agencies related to the National Police both within and outside the Karanganyar Regency area.

Keyword: Optimization, Early Detection, Pencak Silat Organization Conflict.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang kaya akan Bahasa dan budaya. Budaya dan warisan Indonesia yang telah mendunia serta ditetapkan oleh UNESCO (*United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization*) adalah Pencak Silat. UNESCO menetapkan pencak silat sebagai Warisan Budaya Tak Benda Dunia (*Intangible Cultural World heritage*) milik Indonesia. Hal ini dilakukan oleh pemerintah guna memperkenalkan nilai budaya Indonesia agar mendapat pengakuan Dunia Internasional melalui pencak silat.

Pencak Silat merupakan seni bela diri tradisional Indonesia yang memerlukan banyak konsentrasi dan teknik pernafasan. Kutipan dari publikasi Memahami Makna Seni Pencak Silat (2019: 300), ditulis oleh Suryo Ediyono dan Sahid Teguh Widodo, Pencak adalah serangan bela diri dalam bentuk tarian dan irama dengan aturan (sopan santun) dan dapat digunakan sebagai pertunjukan. Silat adalah inti dari pencak, sedangkan pertarungan atau bela diri bukan lagi tontonan. Jadi, secara harfiah pencak silat memiliki arti berjuang dengan seni.

Di dalam pencak silat sendiri terdapat pengaruh dari budaya Tionghoa, agama Hindu, Bhudha, dan Islam. Bahkan masing-masing daerah memiliki ciri khasnya sendiri. Seperti, aliran cimade dan cikalong yang dimiliki oleh Jawa Barat, merpati putih oleh Jawa Tengah dan PSHT, Perisai Diri dan Tapak Suci dengan Jawa Timur. Aliran silat telah menyebar ke seluruh wilayah Indonesia bahkan Asia, seperti, Malaysia, Brunei, Singapura, Filipina Selatan, dan Thailand selatan akibat penyebaran beragam suku Nusantara. Seiring dengan berkembangnya Pencak Silat, tahun 2021 di Indonesia terdapat 5 perguruan pencak silat terbesar dikutip

dari situs Ayo Olahraga (2021) yaitu, Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT), Ikatan Keluarga Silat "Putra Indonesia" (IKS.PI), Pencak Silat Nahdatul Ulama Pagar Nusa, Tapak Suci Muhammadiyah, Merpati Putih

Di Jawa tengah sendiri khususnya kabupaten Karanganyar, terdapat beberapa aliran pencak silat yang berdiri dan aktif. Menurut pernyataan dari Solopos.com (2021), terdapat 12 aliran pencak silat di kabupaten Karanganyar yang bergabung dengan Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) diantaranya yaitu Tapak Suci Muhammadiyah, Perisai Diri dan PSHT Pusat Madiun, PS Hasta Manunggal, IKSPI Kera Sakti, Persinas ASAS LDII, PSHT Winongo, PSHT Parluh 2016, Merpati Putih, PSNU Pagar Nusa, Cempaka Putih, Kumbang Malam.

Di Karanganyar Pencak silat menjadi wadah bagi generasi muda untuk menempa seni beladiri. Hal ini mendapat respon positif dari masyarakat sebagai wadah pembinaan generasi muda. Namun di lain sisi, pencak silat ini melahirkan konflik diantara para perguruan silat maupun dengan warga perguruan silat itu sendiri. Berdasarkan pernyataan dari Joglosemarnews.com (2021), di samping kejadian tidak senonoh, tawuran dan kriminalitas antar aliran pencak silat di Kabupaten Karanganyar tahun 2020 cukup luas. Bahkan, peristiwa ini terbilang fenomenal karena terus terjadi dibandingkan wilayah lain di Soloraya. Dalam setahun kasus tersebut naik 7 kasus dari tahun sebelumnya yang secara sistematis sama halnya seperti meningkat 100% dari tahun sebelumnya. Yang menjadi perhatian khusus adalah fenomena yang masih klasik tentang isu-isu kecil seperti perguruan silat saling mengejek atau menghina, yang kemudian meningkat menjadi pertengkaran antar perguruan. Menurut pernyataan dari Kapolres Karanganyar dalam wawancara oleh Joglosemar News "Dilihat dari karakteristik dasar masalahnya, penyebab perkelahian tidaklah berat. Yakni teman membela teman tanpa memperdulikan siapa yang salah atau benar," (Wardoyo, 2021).

Dalam berita yang dikeluarkan oleh Joglosemarnews.com (2019), kericuhan yang melibatkan dua aliran silat kubu Persaudara Setia Hati Terate (PSHT) itu terjadi di sebuah hajatan warga di Mojogedang, Karanganyar tepatnya di Desa Gebyog tanggal 24 Desember 2019 malam. Kasus tersebut terungkap setelah Polres setempat menggelar konferensi pers, Kamis (26/12/2019) siang. Dengan didampingi Kasat Reskrim, Kapolres AKBP Leganek Mawardi memimpin langsung pelaksanaan konferensi pers. Berdasarkan kronologi, kejadian tersebut bermula pada malam hari di acara yang digelar oleh salah satu warga desa Gebyog. Saat hiburan campursari dimulai, terdapat dua orang warga PSHT menggunakan kaos bergambar atribut perguruan pencak silatnya berinisial AL dan PW datang ke acara tersebut. Berdasarkan penjelasan dari Kapolres, keduanya dalam kondisi pengaruh minuman keras. Mereka ikut berjoget dengan kondisi setengah sadar. Keduanya berjoget dengan tidak tertib dan meracau dalam kondisi mabuk hingga bersenggolan. Kebetulan beberapa warga PSHT dari kubu berbeda berada di tempat yang sama. Melihat dua jawara itu semakin membuat ulah, beberapa warga PSHT dari kubu yang berbeda berusaha memperingatkan dan menyuruh mereka pulang. Sayangnya, AL dan PW memaknai peringatan ini secara berbeda. Terjadilah cek cok antar mereka, hingga akhirnya mereka lepas kendali. AL dan PW pun diberi pukulan oleh mereka. AL dan PW dikeroyok hingga membuat keduanya babak belur. Keempat warga tersebut diketahui sebagai warga desa Gebyog berinisial AF, AP, SP dan DM. AL dan WP kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek. Hasil visum menyebutnya keduanya mengalami luka di kepala dan hidung. Akhirnya keempat pelaku pengeroyokan itu ditetapkan sebagai tersangka. Keempat pelaku tersangka pengeroyokan telah diamankan dan ditahan di Polres untuk diproses lebih lanjut. Kasus tersebut berkaitan dengan pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara (Wardoyo, 2019).

Selain itu, pada Suarasurakarta.id (Februari 04, 2021) memamparkan bahwa terdapat ratusan orang anggota perguruan silat ricuh karena adanya kasus penganiyaan antaranggota perguruan silat. Sedangkan pada 25 Juli 2021 dalam iNewsJateng.id diberitakan bahwa Puluhan pesilat berhasil diamankan Polisi ketika hendak tawuran. Hal ini tentunya menjadi salah satu keberhasilan anggota Satintelkam dalam pencegahan konflik perguruan pencak silat. Namun, ternyata masih terus ada kasus konflik perguruan pencak silat di tahun-tahun berikutnya seperti data yang ditemukan penulis melalui wawancara internal terhadap warga bahwa pada tahun 2023 awal sudah beberapa kali terjadi kasus perguruan antar pencak silat yang mengakibatkan keamanan di Kabupaten Karanganyar terganggu.

Dari beberapa kasus yang terjadi sebelumnya, rata-rata dilakukan secara berkelompok dengan membawa nama dari perguruan yang mereka ikuti. Tindakan yang mereka lakukan dengan saling bersinggungan bukan hanya menyebabkan korban diantara mereka sendiri, tetapi juga menjadi ancaman gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang dapat merugikan serta meresahkan warga sekitar. Di sini Polri berperan dalam mengatur dan memelihara keamanan masyarakat sesuai dengan tugas pokok Polri untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan Pasal 13 Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002.

Polri mengemban tanggung jawab besar dalam melaksanakan tugasnya agar seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari tingkat pusat sampai tingkat desa mendapatkan pelayanan dan keamanan yang sama. Guna mewujudkan itu semua, dalam satu provinsi terdapat Kepolisian Daerah (Polda) sebagai satuan pelaksana utama kewilayahan yang berada di bawah Kapolri; Kepolisian Resort yang menjaga keamanan sebuah kota atau kabupaten; dan Kepolisian Sektor (Polsek) yang menjaga keamanan sebuah kecamatan. Pembagian struktur

wilayah kepolisian pada dasarnya didasarkan dan diadaptasi dari wilayah administrasi pemerintahan sipil, dengan komando utama di Mabes Polri di Jakarta.

Hoegeng (Sutanto, 2003) mengemukakan bahwa tugas Polisi Republik Indonesia (Polri) dibagi dalam lima fungsi teknis operasional yaitu fungsi teknis Sabhara, Lalu lintas, Reserse, Intelijen dan Binmas. Masing-masing fungsi teknis tersebut menjalankan tugasnya guna memenuhi tugas pokok Polri yakni Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; Menegakkan hukum; dan memberikan Perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat.

Fungsi teknis kepolisian yang berperan penuh dalam Tindakan preemtif guna menangani potensi gangguan sebelum terjadinya ambang gangguan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat adalah satuan Intelijen Keamanan. Satintelkam memiliki tugas menyelenggarakan dan membina fungsi intelijen bidang keamanan, pelayanan skck, mengumpulkan dan mengolah data yang berkaitan dengan perizinan kegiatan masyarakat maupun politik, serta membuat rekomendasi atas permohonan izin memegang senjata api dan penggunaan bahan peledak.

Satuan Intelijen memiliki fungsi preemtif dan preventif dalam artian melakukan pencegahan suatu kejadian sebelum suatu kejadian itu terjadi. Mencegah peningkatan angka kriminalitas dapat dilakukan melalui peningkatan fungsi satuan intelijen dalam melakukan penyelidikan, pengamanan maupun penggalangan guna mendapatkan bahan keterangan, melakukan deteksi dini (*early detection*), serta peringatan dini (*early warning*) untuk dilaporkan kepada pimpinan kemudian selanjutnya pimpinan akan mengambil kebijakan guna menentukan langkah dan tindakan yang akan diambil dalam mengatasi permasalahan sesuai dengan bahan keterangan yang telah dilaporkan.

Maraknya fenomena konflik antar komunitas Pencak Silat menjadi antensi khusus bagi Polres Karanganyar. Sebagai fungsi yang menjalankan

tugas preemtif dan preventif, maka satuan intelijen diharapkan mampu mendeteksi dan memperkirakan terkait hal-hal yang akan terjadi maupun pergerakan dari komunitas-komunitas dan organisasi Pencak Silat serta berkoordinasi dengan para pemimpin dan ketua perguruan Silat yang berada di wilayah Kabupaten Karanganyar guna menjalin hubungan serta menjaga kondusifitas yang ada agar situasi kamtibmas terus terjaga sehingga memberikan rasa aman kepada masyarakat. Berdasarkan data yang diterima dari Satintelkam Polres Karanganyar bahwa konflik pencak silat tiap tahunnya terus mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2020 terjadi 7 kasus bentrok dan pertikaian, di tahun 2021 terjadi 9 kasus dan pada tahun 2022 sebanyak 10 kasus yang semuanya melibatkan perguruan pencak silat.

Oleh sebab itu, maka penulis tertarik menetapkan judul rencana penelitian “OPTIMALISASI KINERJA SATUAN INTELKAM MELALUI DETEKSI DINI GUNA MENCEGAH KONFLIK ANTAR PERGURUAN SILAT DI WILAYAH HUKUM POLRES KARANGANYAR”.

1.2 Permasalahan

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, selanjutnya yang menjadi fokus permasalahan dari penelitian ini adalah **“MENGAPA KINERJA SATUAN INTELKAM DALAM DETEKSI DINI GUNA MENCEGAH TERJADINYA KONFLIK ANTAR ORGANISASI PERSILATAN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT YANG KONDUSIF DI WILAYAH HUKUM POLRES KARANGANYAR BELUM OPTIMAL”**.

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, selanjutnya penulis membagi beberapa persoalan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana kinerja deteksi dini satuan intelkam guna mencegah terjadinya konflik antar organisasi persilatan dalam rangka mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif di wilayah hukum polres karanganyar?

2. Apakah pelaksanaan penyelesaian konflik yang dilakukan oleh satuan intelkam guna mencegah konflik perguruan Pencak silat di wilayah hukum Polres Karanganyar terlaksana dengan baik?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi pelaksanaan kegiatan deteksi dini intelijen di Polres Karanganyar dan upaya-upaya yang telah dilakukan guna meningkatkan kinerja Polres Karanganyar.

1.3.2 Tujuan

Berdasarkan persoalan–persoalan di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan kinerja satuan Intelkam Polres Karanganyar dalam pelaksanaan giat deteksi dini guna mencegah terjadinya konflik antar organisasi persilatan dalam rangka mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polres Karanganyar.
2. Mengidentifikasi upaya deteksi dini yang dilakukan Satuan Intelkam Polres Karanganyar dalam mencegah konflik antar perguruan pencak silat.

1.4 Ruang Lingkup

Penulisan Tugas Akhir ini mencakup pembahasan mengenai pelaksanaan tugas satuan intelijen keamanan dalam penanggulangan konflik antar Organisasi Perguruan Pencak Silat di Kabupaten Karanganyar dan kegiatan deteksi dini satuan intelijen keamanan Polres Karanganyar guna mencegah terjadinya konflik serta optimalisasi deteksi dini guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polres Karanganyar.

1.5 Metode penelitian

1.5.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini memfokuskan dan mencapai hasil yang diharapkan, maka perlu ditentukan pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan. Adapun pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian sosial, terdapat 3 jenis pendekatan penelitian yakni kualitatif, kuantitatif dan kuantitatif (gabungan keduanya). Esensi dari adanya pendekatan penelitian bagi seorang peneliti adalah agar dapat mempermudah peneliti dalam menjawab rumusan permasalahan. Pendekatan kualitatif akan digunakan dalam penelitian ini untuk menggali makna-makna pribadi dari pengalaman-pengalaman partisipan penelitian, dan memahami situasi-situasi sosial kompleks dan spesifik tanpa perlu membuat parameter-parameter sebelumnya.

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif untuk menjawab permasalahan yang akan diteliti. Menurut Dr. Saifuddin Azwar, MA (2013) pendekatan kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada analisis pada proses berpikir deduktif dan induktif melalui cara berpikir formal dan argumentatif.

Pendekatan kualitatif mengacu pada penelitian yang menekankan pada analisis dinamika hubungan antara fenomena yang diamati serta analisis proses berpikir deduktif dan induktif, yang berdasarkan logika ilmiah tidak berarti bahwa pendekatan kualitatif tidak menggunakan data kuantitatif tetapi fokusnya bukan pada pengujian hipotesis namun mencoba menjawab pertanyaan penelitian melalui pemikiran normal dan rasional. Ditemukan sebagian besar penelitian kualitatif adalah penelitian sampel kecil. (Dr. Saifudin Azwar, MA, 2013:5)

b. Jenis Penelitian

Berdasarkan pendekatan penelitian yang melihat fokus penelitian secara holistic, maka peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Dengan penelitian lapangan peneliti akan terjun langsung ke lapangan sebagai pengamat untuk mengumpulkan data sebanyak-banyaknya dikarenakan lingkungan alamiah adalah sumber informasi.

Penelitian lapangan (*field research*) metode pengumpulan data kualitatif serta pendekatan penelitian kualitatif yang luas. Ide pentingnya adalah peneliti terjun langsung untuk mengamati fenomena dalam keadaan alamiah atau "*in situ*". Dalam kasus seperti itu, penelitian lapangan berkaitan erat dengan observasi dan partisipasi. Catatan lapangan yang ekstensif dibuat oleh peneliti, kemudian menganalisis dengan berbagai cara dan diberi tanda (Prof. Dr. Lexy J. Moleong, M.A, 2012:26).

Penelitian lapangan merupakan jenis penelitian yang mengharuskan peneliti terjun langsung ke lapangan untuk melihat keadaan yang sebenarnya. Peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam suatu situasi sosial merupakan kajian utama penelitian kualitatif. Peneliti mengamati, mencatat, bertanya, menggali sumber yang erat hubungannya dengan peristiwa yang terjadi saat itu. Hasil yang didapat pada saat berada di lapangan itulah yang akan dianalisis sebagai hasil dari penelitian lapangan.

1.5.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian harus dipusatkan pada tujuan penelitian yang akan dilakukan, dan fokus penelitian harus dinyatakan dengan jelas untuk memudahkan peneliti dalam melakukan observasi. Fokus penelitian adalah struktur penelitian agar penelitian menjadi lebih terarah. Fokus yang dipilih peneliti pada penelitian tugas akhir ini adalah kinerja satuan intelkam dalam giat deteksi dini guna mencegah konflik antar perguruan

pencak silat dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif di wilayah hukum Polres Karanganyar.

Penelitian ini mengangkat suatu permasalahan mengenai peningkatan fenomena konflik antar perguruan pencak silat yang terjadi dalam 4 tahun terakhir di Polres Karanganyar. Peneliti mendeskripsikan tata cara kerja yang dilakukan oleh Polres Karanganyar dalam melakukan deteksi dini terhadap potensi terjadinya konflik antar perguruan pencak silat maupun komunitas - komunitas yang mengatasnamakan perguruan pencak silat. Peneliti juga mengangkat persoalan kinerja anggota Polres Karanganyar dalam melakukan penyelidikan dan deteksi dini terhadap pengumpulan bahan keterangan pada fenomena konflik antar perguruan pencak silat serta faktor - faktor apa saja yang mempengaruhi fungsi intelijen dalam melakukan penyelidikan dan deteksi dini terhadap konflik antar perguruan pencak silat ini.

1.5.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah wilayah Polres Karanganyar. Penelitian difokuskan pada pelaksanaan deteksi dini intelkam yang dilakukan Polres Karanganyar dalam penanggulangan konflik antar perguruan pencak silat. Sedangkan, untuk memperoleh data yang sesuai dengan persoalan yang diteliti maka penelitian akan lebih difokuskan pada wilayah yang memiliki cabang tempat latihan atau wilayah yang merupakan basis maupun pusat dari suatu perguruan pencak silat.

1.5.4. Sumber Data dan Informasi

Sumber data merupakan segala sesuatu yang memberikan bahan informasi mengenai penelitian terkait. Dalam penelitian ini terdapat tiga teknik pengumpulan sumber data yang akan digunakan sebagai acuan dalam memperoleh sumber informasi yaitu sumber data primer, sekunder dan tersier. Data primer merupakan sumber data yang menyediakan data

secara langsung kepada pengumpul data. Peneliti sendiri mengumpulkan data langsung dari sumber pertama atau tempat dilakukannya objek penelitian. Peneliti menggunakan hasil wawancara dengan informan mengenai topik penelitian sebagai informasi dasar (Sugiyono, 2017:456) . Wawancara dalam penelitian ini guna mendapatkan informasi mengenai penyelidikan, deteksi dini dan situasi perkembangan konflik antar organisasi perguruan pencak silat di wilayah hukum Polres Karanganyar di dapatkan dari berbagai sumber, yaitu :

- a. Wakil Kepala kepolisian Resor Karanganyar, KOMPOL PURBO ADJAR WASKITO, S.I.K, M.H. sebagai sumber data primer yang menjelaskan mengenai gambaran umum mengenai situasi dan kondisi kamtibmas di wilayah hukum Polres Karanganyar.
- b. Kepala Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian Resor Polres Karanganyar, IPTU Ali Suryadi, S.H. sebagai sumber data primer yang menjelaskan mengenai peran intelijen baik kemampuan manajemen maupun kemampuan lapangan terutama dalam menangani fenomena konflik antar perguruan pencak silat di wilayah hukum Polres Karanganyar.
- c. Kepala Unit IV Bidang Keamanan Satuan Intelkam Kepolisian Resor Karanganyar, IPDA Untung Basuki, S.H. sebagai sumber data primer yang menjelaskan mengenai upaya dan langkah - langkah yang dilakukan dalam penyelidikan serta deteksi dini fenomena konflik antar Perguruan Pencak Silat selaku Unit yang menangani langsung fenomena tersebut di wilayah hukum Polres Karanganyar.
- d. Anggota Unit IV Bidang Keamanan Satuan Intelkam Kepolisian Resor Karanganyar, BRIPTU Bagus Setyanto, S.H. sebagai narasumber primer yang melaksanakan tugas langsung di lapangan dalam pelaksanaan deteksi dini dan penyelidikan konflik antar perguruan pencak silat di wilayah hukum Polres Karanganyar.

Data sekunder adalah sumber data yang didapatkan secara tidak langsung oleh pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau lewat dokumen (Sugiyono, 2017:456). Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang - undang No. 2 Tahun 2002, Perkabik no 1 tahun 2013, KUHP, laporan intelijen, kirkat, buku, jurnal, artikel yang berkaitan dengan topik penelitian mengenai penyelidikan dan deteksi dini Satuan Intelijen dalam menangani fenomena Pergutuan Pencak Silat.

Data tersier dalam penelitian ini merupakan rujukan dari istilah-istilah yang digunakan oleh penulis dalam menganalisis data primer dan data sekunder. Hal ini dinilai penting mengingat istilah-istilah yang digunakan berupa padanan kata baku yang kurang familier dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mendukung tujuan penelitian ini, penulis mempedomani pencarian data tersier melalui sumber Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

1.5.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode atau cara yang digunakan untuk mengumpulkan data yang akan diteliti. pada penelitian dengan permasalahan konflik antar perguruan pencak silat ini dinilai sebagai fenomena serius yang harus segera di tangani karena dapat mengganggu kodusifitas kamtibmas serta membuat kerugian pada warga sekitar daerah konflik sehingga membuat satuan intelijen untuk bergerak mencari informasi mengenai konflik tersebut. setelah informasi tersebut di peroleh, selanjutnya akan disampaikan kepada pimpinan berupa LI (Laporan Informasi) atau Kirkat (perkiraan singkat) yang kemudian akan diambil kebijakan oleh kapolres sebagai tindak lanjut untuk menangani masalah tersebut. pada penelitian kualitatif ini, teknik pengumpulan data yang bisa digunakan adalah wawancara, observas dan studi dokumen.

a. Wawancara

Wawancara merupakan proses interaksi antara pewawancara dengan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi langsung atau mengajukan pertanyaan secara langsung tentang subjek penelitian (Yusuf, 2014:372). Wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara bebas terpimpin. Menurut Arikunto (2016:199) wawancara bebas terpimpin merupakan wawancara yang dilakukan dengan pertanyaan bebas, namun tetap mengikuti petunjuk wawancara yang telah disiapkan. Pertanyaan berkembang selama wawancara. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi terkait penelitian tentang investigasi dan deteksi dini satuan intelijen dalam menangani konflik antar aliran pencak silat.

b. Observasi

Menurut Sugiyono (2017:229) observasi adalah teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain. Observasi yang dilakukan tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek alam lainnya. Melalui observasi, peneliti mempelajari tentang perilaku dan arti dari perilaku tersebut. Dalam penelitian ini observasi dilakukan melalui pengamatan secara langsung pada kinerja Satuan Intelijen Polres Polres Karanganyar dan organisasi perguruan pencak silat di lapangan guna mengetahui kondisi yang sebenarnya di wilayah Hukum Polres Karanganyar.

Menurut Yusuf (2014:384) kunci keberhasilan observasi sebagai teknik pengumpulan data sangat ditentukan oleh peneliti itu sendiri, karena peneliti melihat dan mendengarkan suatu objek penelitian kemudian peneliti menyimpulkan berdasarkan dengan apa yang diamati. Peneliti memberikan makna pada pengamatan mereka berdasarkan relitas dan konteks yang alami, peneliti yang bertanya dan juga mengamati bagaimana hubungan antara satu aspek dengan aspek lainnya pada objek yang diteliti.

c. Studi Dokumen

Dokumen diartikan secara harfiah sebagai sesuatu yang tertulis atau tercetak dan setiap benda yang mengandung informasi dipilih untuk dikumpulkan, disusun, disediakan atau untuk disebarluaskan. Dokumen merupakan surat penting atau berharga yang sifatnya tertulis maupun tercetak yang berfungsi atau dapat dijadikan sebagai barang bukti ataupun keterangan. Dalam arti luas, setiap informasi yang dikumpulkan secara digital, lisan atau tertulis dapat diklasifikasikan sebagai dokumen. Dokumen dapat diartikan sebagai semua catatan tertulis, baik tercetak maupun tidak tercetak. Dan segala benda yang mempunyai keterangan-keterangan dipilih kemudian dikumpulkan, disusun, disediakan, atau untuk disebarluaskan.

Penelaahan dokumen membantu peneliti dalam membuktikan fenomena yang terjadi dalam suatu objek penelitian yang kemudian dijadikan bukti terhadap validitas data. Dengan adanya kegiatan wawancara dari narasumber yang terpercaya, pengamatan secara langsung oleh peneliti dan mengumpulkan informasi serta memeriksa dokumen-dokumen, maka diharapkan triangulasi data dari penelitian dianggap sah.

1.5.6 Validitas Data

Peneliti melakukan pemeriksaan validitas data guna memastikan terjaminnya keakuratan data. Kesalahan dalam menginput data akan menyebabkan kesalahan dalam penarikan kesimpulan. Sebaliknya, jika data yang diterima benar, maka hasil penelitian yang diperoleh kemungkinan besar benar. Alwasilah (dalam Bachri 2010:54) menjelaskan bahwa

“Pada akhirnya, tantangan untuk semua jenis penelitian adalah untuk menghasilkan ilmu pengetahuan yang valid, akurat, beretika dan benar”.

Menurut Alwasilah (dalam Bachri, 2010:54), ter dapat 3 hal yang harus dirasakan dalam kebenaran dan keabsahan “yakni: 1) deskriptif, 2) interpretasi, dan 3) teori dalam penelitian kualitatif”. Teknik pemeriksaan diperlukan untuk menentukan keakuratan data. Menurut Bachri (2010:55) ada 4 (empat) Teknik pemeriksaan data yang berdasarkan pada sejumlah kriteria tertentu yaitu:

1. Derajat kepercayaan (*credibility*)

Konsep validitas internal dari non kualitatif pada dasarnya digantikan oleh *credibility*. Fungsinya untuk melaksanakan inkuiri agar tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai dan menunjukka tingkat kepercayaan terhadap hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti terhadap beberapa fakta yang sedang diteliti.

2. Keteralihan (*transferability*)

Penelitian dianggap memenuhi standar tranferabilitas apabila pembaca penelitian kualitatif dapat menggambarkan dengan jelas penelitian tersebut apabila diterapkan. Oleh karena itu, peneliti harus melakukan penelitian secara jelas, rinci, sistematis, dan terpercaya hingga pembaca dapat mengerti dan memahami hasil penelitian.

3. Kebergantungan (*dependability*)

Merupakan substitusi istilah reliabilitas dalam penelitian non-kualitatif, yaitu Ketika mengecualikan dua atau lebih pengulangan di bawah kondisi yang sama dan pada dasarnya memiliki hasil yang sama. Sedangkan dalam penelitian kualitatif sangat sulit mencari kondisi yang benar-benar sama. Selain itu karena faktor manusia sebagai instrumen, faktor kelelahan dan kejenuhan akan berpengaruh.

4. Kepastian (*confirmability*)

Kriteria kepastian atau objektivitas pada penelitian kualitatif hendaknya ditekankan pada datanya bukan pada orang atau banyak orang.

1.5.7 Teknik Analisis data

Menganalisis isi dokumen dengan memeriksa dokumen secara sistematis dan objektif bentuk-bentuk komunikasinya yang tertuang secara tertulis. Weber menjelaskan bahwa kajian isi adalah metode yang menggunakan serangkaian prosedur untuk menarik kesimpulan yang valid tentang sebuah buku atau dokumen.

Analisis data dilakukan sejak data dikumpulkan, yaitu hasil studi pendahuluan dan data sekunder, serta analisis jawaban wawancara. Analisis data dalam wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan satu demi satu sampai informasi yang diperlukan tersedia. Patton menyatakan bahwa analisis data adalah proses memilah kumpulan data, mengaturnya ke dalam pola, kategori, dan unit deskriptif dasar. (Wandi, 2013: 527).

Dalam menganalisis data, terdapat 3 (tiga) komponen analisis data yaitu (1) Reduksi data, (2) Sajian Data, dan (3) Penarikan Kesimpulan. Mengenai ketiga analisis data tersebut adalah sebagai berikut :

a. Reduksi Data

Menurut Sugiyono (2018:247-249) Reduksi data adalah meringkas, memilih hal-hal yang penting, fokus terhadap hal-hal penting yang sesuai dengan topik penelitian, mencari tema dan pola yang pada akhirnya memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan kelanjutan pengumpulan data. Pelaksanaan reduksi data akan dipandu dengan tujuan yang akan dicapai dan telah ditentukan sebelumnya. Reduksi data juga merupakan proses berfikir kritis yang membutuhkan kecerdasan tinggi dan pemahaman wawasan yang dalam.

b. Sajian Data

Setelah melakukan reduksi data, berikutnya adalah penyajian data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa berupa deskripsi singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Namun yang

sering digunakan dalam penelitian kualitatif data sering disajikan dalam bentuk teks yang bersifat naratif. Melalui penyajian data tersebut, maka data akan terorganisasi dan tersusun sehingga data akan mudah untuk dipahami (Sugiyono, 2018:249).

c. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir dalam menganalisis penelitian ini adalah kesimpulan. Menurut Sugiyono (2018:252-253) kesimpulan dari penelitian kualitatif akan menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal, namun bisa juga tidak, karena semuanya bergantung pada penelitian yang dilakukan peneliti masih dapat berkembang dan perumusan masalah dalam penelitian kualitatif hanya bersifat sementara. Penarikan kesimpulan penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih tidak jelas, menjadi jelas setelah diteliti. Penarikan kesimpulan akan menjadi bahan yang akan di hubungkan dengan teori - teori guna memecahkan suatu persoalan yang terjadi di wilayah hukum Polres Karanganyar dalam menangani fenomena konflik antar perguruan pencak silat.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan rencana penelitian yang berjudul “OPTIMALISASI KINERJA SAT INTELKAM MELALUI DETEKSI DINI GUNA MENCEGAH KONFLIK ANTAR PERGURUAN SILAT DI WILAYAH HUKUM POLRES KARANGANYAR.” Sistematika penulisan dibagi menjadi 5 bab. Susunan penulisan penelitian dijelaskan sebagai berikut :

a. Bab I pendahuluan

pada bab I, penulis menjelaskan mengenai latar belakang permasalahan, maksud, tujuan serta ruang lingkup dari penelitian yang ambil oleh penulis. Pada bab ini juga, penulis mendeskripsikan sistem yang akan digunakan dalam memperoleh data penelitian.

Penulis menjelaskan pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data yang diperlukan, teknik pengumpulan data, validitas data yang nantinya akan di hubungkan berdasarkan triangulasi data yang telah dilaksanakan di Polres Karanganyar.

b. Bab II Tinjauan Kepustakaan

Tinjauan kepustakaan berisi landasan yang digunakan penulis sebagai pedoman penulisan seperti teori dan konsep mengenai permasalahan penelitian. landasan teori dan konsep yang digunakan akan menjadi pisau analisis dalam melaksanakan penelitian untuk memecahkan masalah pada permasalahan penelitian.

c. Bab III Kondisi Faktual

Kondisi faktual menguraikan kondisi awal/ pokok-pokok permasalahan sesuai hasil penelitian, didukung dengan data dan teori yang relevan. Perolehan data menggunakan teknik pengumpulan data berdasarkan metode penelitian yang dicanangkan pada Bab I. Pada bab ini pula, penulis menguraikan faktor-faktor yang memengaruhi kondisi awal di ruang lingkup penelitian untuk dianalisis berdasarkan pengaruh internal maupun eksternal pada pokok permasalahan yang diteliti serta upaya dan kinerja satuan intelijen keamanan dalam menangani permasalahan konflik antar perguruan pencak silat di wilayah hukum Polres Karanganyar.

d. Bab IV Langkah-Langkah Pemecahan Masalah

Penulis mendeskripsikan kondisi yang diharapkan terjadi berdasarkan teori dan konsep yang relevan. Penulis menguraikan kondisi yang diharapkan secara obyektif, terukur dan dapat terlaksana. Selain itu, penulis juga mengaitkan kondisi faktual pada bab sebelumnya dengan kondisi yang diharapkan terjadi berdasar pada pisau analisis yang diterapkan sebagai langkah-langkah pemecahan masalah, yang berkaitan dengan permasalahan konflik

antar perguruan serta kinerja satuan intelijen keamanan dalam penyelidikan dan deteksi dini yang diangkat dalam penelitian ini.

e. Bab V Penutup

Pada bab ini, penulis memberi simpulan atas jawaban dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Simpulan terdiri atas pemecahan masalah dari rumusan masalah, faktor yang memengaruhi kondisi awal serta upaya peningkatan penyelidikan intelijen yang terhubung menjadi sebuah konklusi atas penelitian tugas akhir yang dilakukan penulis. Pada bab ini pula, penulis memberikan saran berupa gagasan yang belum dibahas dalam naskah namun masih relevan dengan pokok pembahasan. Saran yang diberikan oleh penulis diharapkan mampu memperbaiki dan membangun kondisi yang ada menjadi kondisi yang lebih baik. Tentunya, simpulan dan saran yang di berikan dapat menjadi pertimbangan serta solusi dalam menangani konflik antar perguruan pencak silat di wilayah hukum Polres Karanganyar

BAB II

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Penulis membahas beberapa literatur dan teori - teori serta konsep ilmu pada tinjauan pustaka terkait variable - variabel yang diteliti dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan tinjauan kepustakaan dalam menyusun alur penelitian dan landasan berpikir sebagai batasan bagi penulis dalam menulis sehingga penelitian yang dilakukan dapat tercapai dengan baik dan benar. Tinjauan kepustakaan terdiri dari penelitian kepustakaan, kepustakaan konseptual, dan kerangka berpikir.

2.1 Kepustakaan Penelitian

Kepustakaan penelitian adalah literatur yang menyajikan informasi mengenai penelitian terdahulu dari permasalahan yang akan diteliti. Penelitian bersifat empirik lebih berarti dibandingkan penelitian bersifat konseptual. Dokumen laporan hasil penelitian, jurnal - jurnal ilmiah, majalah polisi, skripsi, ataupun penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya menjadi literatur dalam penelitian ini. Kepustakaan penelitian dalam dalam penulisan ini diperoleh dengan cara menggali berbagai literatur, konsep - konsep dan hasil penelitian terdahulu. Beberapa penelitian yang berkaitan dengan topik dan permasalahan penelitian antara lain:

- a. Penelitian FX.Sujadmoko & Hery Hermawan Universitas Merdeka Madiun tahun 2019 dengan judul “Prospek Kearifan Lokan Budaya Masyarakat Jawa dalam Prespektif Penanganan Konflik dan Kekerasan Sosial Antar Perguruan Pencak Silat di Wilayah Madiun”. Kajian ini difokuskan pada usaha mencermati dan menelaah secara mendalam dan komprehensif pada beberapa aspek permasalahan dalam penanganan konflik dan kekerasan sosial antar perguruan pencak silat.

- b. Penelitian Tubagus Anis Angkawijaya Universitas Langlangbuana Bandung tahun 2020 dengan judul “Pendeteksian Dini Intelijen Dalam Mencegah Konflik Sosial”. Penelitian ini difokuskan pada pelaksanaan deteksi dini Polres Poso guna mencegah konflik sosial dalam rangka harkamtibmas.
- c. Penelitian yang dilakukan oleh Risma Monica alumni Universitas Islam Riau tahun 2021 dengan judul “Peran Unit Intelkam Kepolisian dalam Mendeteksi Dini Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan” persamaan dari penelitian ini yakni menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan fokus penelitian peran unit intelkam kepolisian dalam mendeteksi dini kejahatan pencurian dengan kekerasan. Perbedaan pada karya ilmiah ini adalah teori pencegahan kejahatan dan wilayah penelitian di Polres Pelalawan, Riau.

Tabel 2.1
Rangkuman Kajian Kepustakaan

No	Penulis	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1	2	3	4	5	6
1	FX.Sujadmoko & Hery Hermawan	“Prospek Kearifan Lokan Budaya Masyarakat Jawa dalam Prespektif Penanganan Konflik dan Kekerasan Sosial Antar Perguruan Pencak Silat di Wilayah Madiun	1. kearifan lokal budaya masyarakat Jawa sebagai ‘ <i>ugeman</i> ’ (pedoman) telah menjadi prinsip di dalam segala kegiatan dan kehidupan sehari-hari 2. perguruan pencak silat memberikan turunan sikap dan perilaku sebagai	1. pendekatan kualitatif. 2. membahas konflik perguruan pencak silat dengan kearifan budaya.	1. membahas deteksi dini sebagai pencegahan konflik pencak silat. 2. lokasi penelitian yang berada di madiun.

1	2	3	4	5	6
			acuan atau pengingat bagi setiap anggota dalam menjalani pergaulan kehidupan sehari-hari. 3. saling membela satu sama lain hingga konflik antar pihakpihak yang terlibat tidak terhindarkan		
2	Anis Angkawijaya	"Pendeteksian Dini Intelijen Dalam Mencegah Konflik Sosial	1. kurangnya pemahaman perundangan dan metode perekrutan serikat pekerja dan lintas sectoral belum sinkron. 2. sumberdaya yang kurang memadai sehingga menyebabkan antisipasi konflik kurang maksimal.	1. pendekatan kualitatif 2. penggunaan deteksi dini dalam pencegahan konflik sosial.	1. pembahasan deteksi dini yang terkusus pada konflik sosial perguruan pencak silat. 2. lokasi penelitian berada di poso
3	Risma Monica	Peran Unit Intelkam Kepolisian dalam Mendeteksi Dini Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan	1. pelaksanaan deteksi dini yang sudah sesuai dengan SOP	1. pendekatan kualitatif 2. membahan pelaksanaan deteksi dini satuan intelijen.	1. pembahasan deteksi dini untuk mencegah konflik sosial pencak silat. 2. lokasi penelitian berada di Riau

2.2 Kepustakaan Konseptual

Landasan teori merupakan landasan berpikir dan pedoman dalam melakukan penelitian. Penulis menggunakan beberapa teori sebagai landasan berpikir sehingga penelitian dalam penulisan tugas akhir ini dibatasi dan disesuaikan dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan.

2.2.1 Teori

Menurut William Wiersma (dalam Sugioyono, 2017 :77) menyatakan bahwa : *A theory is a generalization or series of generalization by which we attempt to explain some phenomena in a systematic manner.* Teori adalah generalisasi atau kumpulan generalisasi yang dapat digunakan untuk menjelaskan berbagai fenomena secara sistematis.

2.2.1.1 Teori Manajemen

Menurut George R. Terry (dalam Malayu S.P. Hasibuan 2009 :2), "Manajemen adalah suatu proses khusus yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dengan memanfaatkan sumber daya yang ada."

Berdasarkan pengertian tersebut, kegiatan manajerial yang efektif dan efisien dilaksanakan dengan perencanaan yang matang, melihat sarana prasarana yang dimiliki sebagai pengorganisasian, pelaksanaan yang dilaksanakan berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku dalam organisasi serta evaluasi yang dilaksanakan sebagai sarana pengawasan oleh pimpinan kepada bawahan. Hal ini sangat membantu dalam mencapai tujuan jangka pendek dan jangka panjang suatu organisasi.

Dalam manajemen, terdapat fungsi yang memiliki kepentingan masing-masing dan saling terkait satu sama lain. Jika hal itu terjadi pada salah satu unsur yang ada dalam fungsi manajemen maka hasil

yang akan dicapai tidak sesuai dengan harapan, sehingga pelaksanaan kegiatan yang ada tidak berjalan dengan optimal serta tujuan yang sebelumnya direncanakan tidak tercapai sepenuhnya. Fungsi manajemen meliputi:

a. Fungsi Perencanaan / *Planning*

Merupakan suatu kegiatan pembuatan tujuan organisasi dan disertai dengan membuat berbagai rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

b. Fungsi Pengorganisasian / *Organizing*

Merupakan suatu kegiatan yang mengatur sumber daya yang dimiliki organisasi untuk menjalankan kegiatan yang telah direncanakan berdasarkan tujuan organisasi.

c. Fungsi Pengarah / *Directing / Leading / Actuating*

merupakan fungsi kepemimpinan manajer untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja secara maksimal serta menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan dinamis.

d. Fungsi Pengendalian / *Controlling*

Merupakan suatu aktivitas penilaian kinerja berdasarkan standar yang telah dibuat, kemudian akan ada perubahan atau perbaikan jika diperlukan. Pengendalian harus dilaksanakan guna mendapatkan hasil manajemen yang maksimal dalam organisasi.

Berdasarkan pengertian manajemen yang dikemukakan oleh George R. Terry dikaitkan dengan penulisan yang dilakukan penulis sangat berpengaruh bagaimana suatu permasalahan dalam hal ini adalah penyelidikan dari konflik perguruan pencak silat. Dalam mekanismenya sangat diperlukan manajemen mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan.

2.2.1.2 Teori Konflik

Seperti kutipan Wisnu Suhardono (2015: 1) "Konflik merupakan sebuah hasil rasional dari sebuah interaksi antara dua pihak atau lebih

Dalam kehidupan sosial manusia. Konflik dapat terjadi dimana saja dan kapan saja dalam kehidupan bersosial.” Ada beberapa hal yang dapat menimbulkan konflik. Termasuk masalah kesenjangan yang mengakibatkan kecemburuan pada pihak tertentu, yang meliputi kesenjangan sosial, ekonomi, budaya dan agama. Adanya ketidaksetaraan ini berarti bahwa orang-orang di dalam negara menginginkan beberapa otoritas untuk mengatur wilayah mereka. Keinginan ini ditunjukkan melalui gerakan separatis dan pemberontakan dari rakyat yang merasa dirugikan”.

Menurut Wisnu Suhardono (2015:1) “konflik interpersonal ialah konflik yang terjadi antar individu. Konflik ini terjadi dalam setiap lingkungan sosial, seperti dalam keluarga, kelompok teman sebaya, sekolah, masyarakat dan negara. Konflik ini dapat berupa konflik antar individu dan kelompok, baik di dalam sebuah kelompok (intragroup conflict) maupun antar kelompok (intergroup conflict). Dalam penelitian ini, titik fokusnya adalah pada konflik sosial remaja, dan bukan konflik dalam diri individu (intrapersonal conflict).”

Konflik bukan sesuatu gejala yang berdiri sendiri tetapi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses-proses yang berlangsung dalam kehidupan sosial manusia, yang secara keseluruhan juga mencakup kerjasama dan kompetisi. Sebuah kerjasama dapat berubah menjadi kompetisi dan selanjutnya dapat berubah menjadi konflik di antara para pelakunya. “Sebaliknya sebuah konflik dapat menjadi kompetisi atau dapat berubah menjadi sebuah kerjasama di antara para pelakunya.

a. Penyebab konflik

Mengkaji penyebab konflik yang terjadi juga akan menggunakan teori konflik dari “Teori Kebutuhan Manusia akan digunakan untuk analisis fenomena yang dikaji teori

mengemukakan bahwa konflik disebabkan kebutuhan dasar manusia meliputi fisik, mental dan sosial yang tidak terpenuhi. Kebutuhan itu terutama terkait” (Gamayanti, 2019: 12) Lebih lanjut menurut Simon Fisher (2001), “tujuan dari teori kebutuhan manusia untuk mengatasinya adalah sebagai berikut:

- 1) Membantu pihak berkonflik untuk mengidentifikasi, menyampaikan kebutuhan yang tidak terpenuhi, memunculkan beragam pilihan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
- 2) Para pihak menyepakati kebutuhan identitas penting semua pihak”.

b. Sumber Konflik

Menurut Wisnu Suhardono (2015: 1), “Sumber konflik (*source*), diantaranya; perbedaan fisik, perbedaan kepentingan, perbedaan perlakuan, perbedaan identitas, keterbatasan sumber daya, bahasa, terputusnya komunikasi, perbedaan persepsi, dan stereotip. 2). Pihak-pihak yang berkonflik (*stakeholder*), yaitu pihak-pihak yang berkonflik atau memiliki kepentingan yang saling bertentangan, antara lain; individu, kelompok, dan pihak ketiga (*mediator, free rider, dan lain sebagainya*).”

c. Proses-proses Konflik

Menurut Parsudi Suparlan (2008: 687), suatu konflik biasanya bermula terwujud sebagai pertengkaran antara dua orang, yang saling tukar menukar kata-kata penghinaan, dan intimidasi. Konflik seperti ini dapat terhenti bila ada yang mengalah atau ada pihak ketiga yang mampu menghentikannya. Pertengkaran antara dua orang ini dapat berlanjut menjadi perkelahian dimana salah satu pihak ada yang kalah atau cidera atau bahkan terbunuh. Keluarga dan kerabat serta teman-teman dari yang kalah atau yang cidera atau terbunuh akan berusaha membalas dendam. Pihak yang menang akan meminta bantuan keluarga, kerabat, dan teman-

teman untuk mempertahankan diri. Di daerah pedesaan, proses-proses sosial seperti ini biasanya terjadi, yaitu semula adalah konflik antar perorangan berubah menjadi konflik sosial.

Dalam penelitian ini, teori mengenai konflik ini digunakan dalam penelitian untuk membahas terkait faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya konflik antar perguruan pencak silat. Melalui pendekatan yang tercantum dalam teori ini, penulis berusaha untuk mengidentifikasi serta menganalisa akar permasalahan yang menjadi penyebab konflik tersebut. Bila inventarisasi akar permasalahan penyebab terjadinya konflik tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, maka hal ini akan memberikan informasi penting bagi kepolisian dalam hal ini untuk merumuskan suatu strategi pemolisian yang tepat guna mencegah dan menanggulangi konflik tersebut terulang kembali.

2.2.1.3 Perilaku Kolektif

Konsep perilaku kolektif dalam kajian sosiologi yang mana konsep yang terakhir ini lebih bersifat spontan dan berlangsung dalam waktu relatif singkat namun menurut pendapat Smelser bahwa suatu perilaku kolektif paling tidak memiliki beberapa macam ciri seperti : pertama kondisi struktural dalam arti struktur masyarakat sedemikian rupa yang memberi ruang lebih terbuka dan longgar bagi munculnya perilaku kolektif. Kedua adanya tekanan struktural yang maksudnya fenomena nasional ini muncul manakala individu dalam masyarakat dihadapkan pada satu masalah yang sangat penting dan kemudian mereka secara bersama mencari solusi untuk mengatasi masalah tersebut (Haris, 2019: 18).

Smelser menitik beratkan penjelasannya pada perilaku kolektif pada faktor sosiologis (Smelser, 1968: 12). Dalam mengembangkan teori mengenai perilaku kolektif, Smelser meminjam konsep nilai

tambah (*value added*) dari ilmu ekonomi, perilaku kolektif ditentukan oleh enam faktor yang berlangsung secara berurutan, yakni:

- a. Perilaku kolektif mula-mula diawali oleh faktor yang dinamakannya *structural conduciviness*, faktor struktur situasi sosial yang menurutnya memudahkan terjadinya perilaku kolektif. Sebagian dari faktor ini merupakan kekuatan alam yang berada di luar kekuasaan manusia, namun sebagian merupakan faktor yang terkait dengan ada-tidaknya pengaturan melalui institusi sosial.
- b. Faktor yang kedua ialah ketegangan struktural (*structural strain*), sebagian besar ketegangan struktural, semakin besar pula peluang terjadinya perilaku kolektif.
- c. Faktor ketiga, berkembang dan menyebarnya suatu kepercayaan umum (*growth and spread of a generalized belief*) merupakan prasyarat berikutnya bagi terjadinya perilaku kolektif.
- d. Faktor keempat terdiri atas faktor yang mendahului (*precipating factors*). Faktor ini merupakan faktor penunjang kecurigaan dan kecemasan yang dikandung masyarakat.
- e. Faktor kelima ialah mobilisasi para peserta untuk melakukan tindakan. Perilaku kolektif terwujud manakala khalayak dimobilisasikan oleh pimpinannya untuk bertindak, baik untuk bergerak menjauhi suatu situasi berbahaya ataupun untuk mendekati orang atau benda yang mereka anggap sebagai sasaran tindakan.
- f. Faktor keenam dan terakhir ialah berlangsungnya pengendalian sosial (*the operation of social control*). Faktor keenam ini merupakan kekuatan yang menurut Smelser justru dapat mencegah, mengganggu, ataupun menghambat akumulasi kelima faktor penentu sebelumnya”.

2.2.1.4 Pencegahan Konflik

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam hal ini, tujuan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Dalam pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 dijelaskan bahwa tugas pokok Polri adalah:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

Menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, “pada bagian ketentuan umum pasal 1 ayat (3) dijelaskan tentang maksud dari pencegahan konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sistem peringatan dini. Pencegahan konflik yang termasuk salah satu bagian dari ruang lingkup penanganan konflik tersebut sebagaimana tercantum pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2012, bertujuan untuk :

- a. Menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tenteram, damai dan sejahtera;
- b. Memelihara kondisi damai dan harmonis dalam hubungan sosial kemasyarakatan;

- c. Meningkatkan tenggang rasa dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- d. Memelihara keberlangsungan fungsi pemerintahan;
- e. Melindungi jiwa, harta benda, serta sarana dan prasarana umum;
- f. Memberikan perlindungan dan pemenuhan hak korban;
- g. Memulihkan kondisi fisik dan mental masyarakat serta sarana dan prasarana umum”.

2.2.2 Konsep

2.2.2.1 Konsep Optimalisasi

Menurut Yuwono dan Abdullah (1994:4) optimalisasi berasal dari kata optimal yang berarti arti terbaik atau tertinggi, sedangkan optimasi diartikan sebagai suatu sistem, proses atau untuk mencapai hasil yang terbaik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005:345) berasal dari kata optimal, berarti terbaik, tertinggi, sedangkan optimalisasi berarti meningkatkan atau memperbaiki. Berdasarkan pengertian di atas maka dapat dikatakan bahwa optimalisasi adalah suatu proses yang dapat dilakukan untuk mencapai hasil terbaik. Optimalisasi dalam penelitian ini adalah perbaikan menuju arah yang lebih baik, agar setiap kegiatan dapat berjalan dengan lancar dan optimal.

2.2.2.2 Konsep Intelijen

Istilah “intelijen” berasal dari kata “intelegensia” yang artinya adalah “kecerdasan”. Dalam arti luas, intelijen merupakan suatu proses yang dalam pengelolaannya memerlukan pemikiran, untuk menghasilkan informasi penting, tentang sesuatu dan akan terjadi. (Saronto dan Kaswita, 2001:7).

Dalam dunia kepolisian, Intelijen mutlak diperlukan sebagai alat *early warning* dan *early detection*. Untuk melaksanakan ini diperlukan suatu alat yang disebut dengan kecerdasan, namun makna

kecerdasan dalam dunia Intelijen bukan hanya cerdas dalam ilmu Intelijen, tetapi juga memiliki banyak akal, mampu memahami masalah, cepat menyesuaikan diri, dan mampu membaca situasi.

Menurut Wahyu Saronto dan Jasir Karwita (2001 : 126) mengenai tugas pokok Intelijen yang diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan:

1. Melakukan deteksi terhadap segala perubahan kehidupan sosial dalam masyarakat serta perkembangan dibidang ipoleksosbud Hankam untuk dapat menandai adanya aspek kriminogen, selanjutnya melakukan identifikasi hakekat ancaman terhadap Kantibmas.
2. Menyelenggarakan fungsi intelijen yang diarahkan kedalam tubuh Polri sendiri dengan sasaran pengamanan materil, personel dan bahan keterangan serta kegiatan badan/satuan, terhadap kemungkinan adanya tantangan yang bersumber dari luar maupun dalam.
3. Melakukan penggalangan dalam rangka menciptakan kondisi tertentu yang menguntungkan instansi Kepolisian
4. Melakukan pengamanan terhadap sasaran sasaran tertentu dalam rangka mencegah kemungkinan pihak pihak tertentu memperoleh peluang dan memanfaatkan keuntungan dari kelemahan ipoleksosbudkam.

Berdasarkan Perkabik nomor 1 tahun 2013 tentang Penyelidikan Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 nomor 3, Intelijen Keamanan Kepolisian Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah Intelijen yang diimplementasikan dalam penyelenggaraan fungsi Kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara, dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri.

2.2.2.3 Konsep Penyelidikan

Pasal 6 Perkabik Nomor 01 Tahun 2013 tentang Penyelidikan Intelijen menyebutkan definisi tentang penyelidikan intelijen, yaitu: Penyelidikan intelijen adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan secara terencana dan terarah dalam rangka mencari dan mengumpulkan bahan keterangan di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan keamanan (Ipoleksosbudkam), selanjutnya diolah dan disajikan kepada pimpinan guna menentukan kebijakan.

Pelaksanaan penyelidikan berpegang teguh terhadap prinsip-prinsip yang telah ditetapkan pada Perkabik Nomor 01 Tahun 2013 pada pasal 5, yaitu:

Prinsip-prinsip penyelidikan intelijen:

- a. Kerahasiaan/clandestine, yaitu penggalangan dilakukan secara tertutup dan hanya diketahui oleh orang tertentu atau yang bersangkutan saja;
- b. Ketelitian, yaitu penggalangan dilakukan secara cermat dan saksama;
- c. Kedisiplinan, yaitu penggalangan dilakukan dengan dilandasi oleh kesadaran terhadap semua peraturan dan tata tertib yang telah ditetapkan;
- d. Keamanan, yaitu penggalangan dilakukan secara berhati-hati;
- e. Keberanian, yaitu penggalangan dilakukan dengan hati yang mantap dan rasa percaya diri dalam menghadapi kesulitan; dan
- f. Mengutamakan sumber informasi di sasaran utama (primer) secara langsung dan hindari sumber informasi kedua (sekunder).

Tahap-tahap yang dilakukan oleh satuan intelijen keamanan dalam melakukan kegiatan penyelidikan tertuang dalam pasal 14 Perkabik Nomor 01 Tahun 2013, yakni:

- a. Perencanaan;
- b. Pengumpulan;
- c. Pengolahan; dan
- d. Penyajian/penggunaan.

Proses pengumpulan merupakan kegiatan penyelidikan untuk mendapatkan dan menghimpun bahan-bahan keterangan dari sumber utama (primer) sesuai dengan rencana penyelidikan. Bentuk-bentuk taktik penyelidikan dalam rangka pengumpulan bahan keterangan dapat dilakukan melalui:

- a. Penyamaran (cover name, cover job, cover story dan lain-lain);
- b. Penyesatan (desepsi kata, desepsi gerak).

Bentuk-bentuk teknik penyelidikan dalam rangka pengumpulan bahan keterangan dapat dilakukan melalui:

- a. Penyelidikan terbuka:
 - 1) Penelitian;
 - 2) Wawancara terbuka;
 - 3) Interogasi;
- b. Penyelidikan tertutup:
 - 1) Wawancara terselubung (*eliciting*);
 - 2) Pengamatan;
 - 3) Penggambaran;
 - 4) Penjejakan;
 - 5) Pembuntutan;
 - 6) Penyusupan;
 - 7) Penyadapan; dan
 - 8) Penyurupan.

Taktik dan teknik dapat dilaksanakan dengan menggunakan personel intelijen (*human intelligence*) dan/atau menggunakan teknologi intelijen (*intelligence technology*). Jika suatu kejahatan ditemukan selama kegiatan Intelijen, maka dapat dilakukan tindakan

kepolisian upaya paksa dalam hal tertangkap tangan untuk selanjutnya dilakukan interogasi lebih lanjut dan sesegera mungkin diserahkan kepada penyidik Polri (Pasal 17 Perkabik No.1 Tahun 2013).

2.3.4 Konsep Peran Intelijen dalam Deteksi Dini

Peran Intelijen adalah mengawasi, menyertai dan mengakhiri setiap perkembangan situasi kamtibmas melalui tindakan pendeteksi dini (*early detection*), pemberi peringatan dini (*early warning*) dan pencegahan dini, sebagai bahan pengambilan keputusan pimpinan Polri termasuk sebagai pelaksanaan dan pengamanan kebijaksanaan pemerintah dan pimpinan Polri dan pencipta kondisi untuk mendukung pelaksanaan tugas Polri serta tugas-tugas pemerintah dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri dan dinamisator kegiatan pembinaan operasional Polri.

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri (Perkabik) Nomor 1 Tahun 2013 diperoleh penjelasan bahwa Penyelidikan bertujuan untuk melaksanakan pengamatan atau penelitian terhadap masalah dan perubahan-perubahan serta perkembangan kehidupan sosial dalam masyarakat untuk dapat menandai trend situasi, selain itu penyelidikan juga ditujukan untuk melaksanakan deteksi dan mengidentifikasi serta assessment ancaman, gangguan atau hambatan terhadap Situasi Kamtibmas. Dalam kegiatan Pengumpulan Bahan Keterangan (Pulbaket) di lapangan, seorang personel intelijen harus menguasai teknik-teknik penyelidikan, antara lain melalui: Penyelidikan Terbuka yang dilakukan secara terbuka, terencana dan terarah melalui kegiatan penelitian berupa wawancara dan interogasi. Kemudian Penyelidikan Tertutup yaitu tata cara penyelidikan yang dilakukan tanpa diketahui dan digunakan untuk memperoleh keterangan mendukung penyelidikan secara terbuka. Yang dilakukan dengan keahlian dan

keterampilan pelaksanaan melalui eliciting, pengamatan, penjejak dan penyusupan.

Deteksi dini adalah merupakan tugas intelijen untuk menemukan indikasi/gejala, tanda-tanda peristiwa, permasalahan dan mengidentifikasi calon pelaku/tersangka, korban serta orang/lembaga yang terlibat dalam suatu masalah/kasus.

Laporan intelijen yang bersifat khusus guna memperkirakan kejadian untuk mencegah terjadinya suatu kejadian adalah Perkiraan Intelijen Singkat (Kirkat). Kirkat berisi kronologis dan analisis singkat atas gangguan kamtibmas atau ancaman baru yang sangat meresahkan masyarakat dan di luar jangkauan perkiraan intelijen Tahunan dan perkembangan situasi yang tidak diprediksi dalam perkiraan intelijen Tahunan. Bersifat khusus dan dibuat secara insidental digunakan untuk:

1. Memberikan hasil peringatan awal (*early warning*) dan deteksi dini (*early detection*) tentang perkembangan situasi dalam periode 1 Tahun berjalan sebagai bahan menentukan cara bertindak
2. Bahan revisi dan melengkapi Kirkat intelijen Tahunan sebelumnya sekaligus sebagai bahan masukan penentuan kebijakan di bidang operasional selanjutnya.

Selain Kirkat, Intelijen juga memiliki Teknik dan taktik dalam mengatasi ancaman dan gangguan keamanan guna memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Teknik dan taktik tersebut adalah:

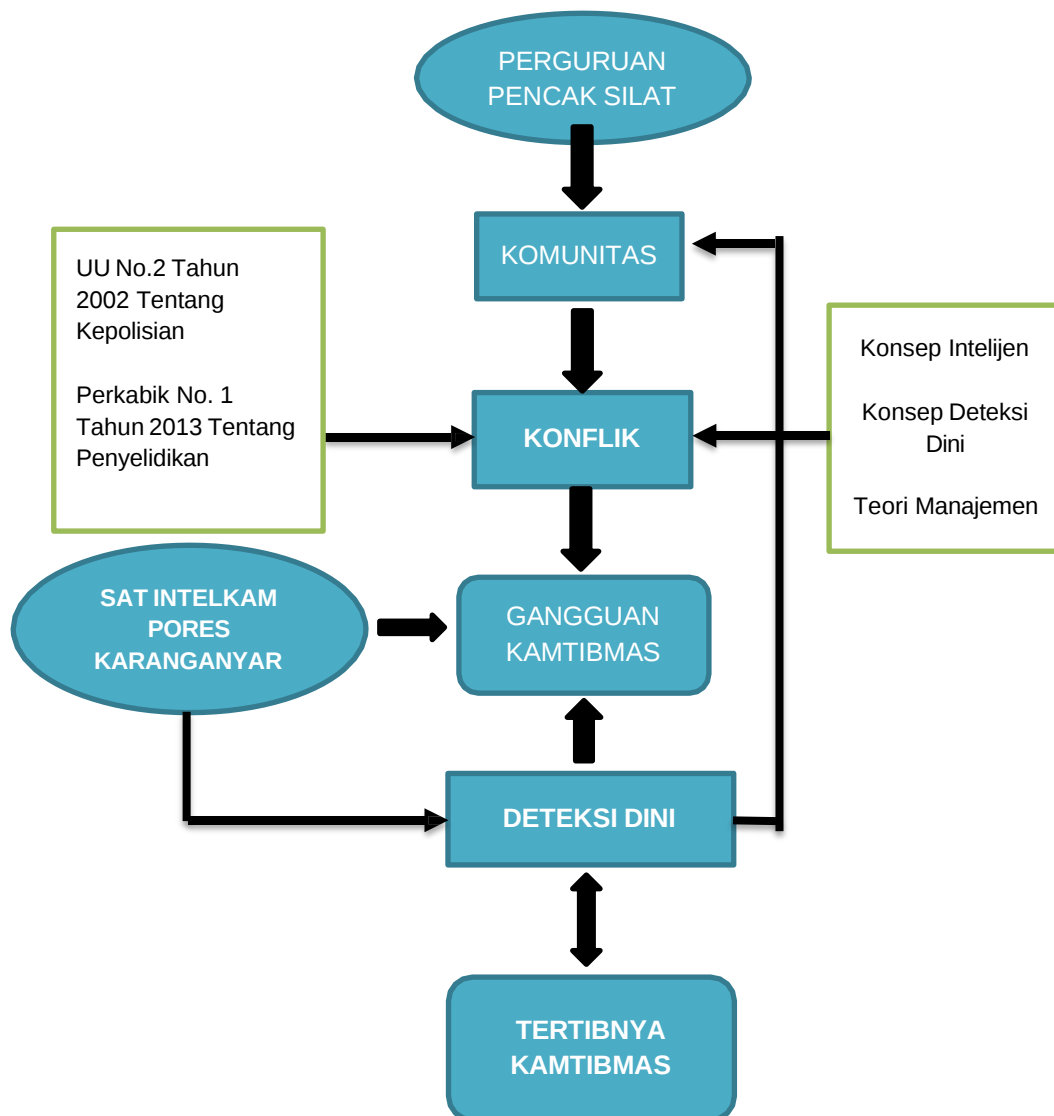
- a. Terhadap sasaran bangunan fisik/sarpras.
 - 1) Melakukan deteksi sedini mungkin terhadap ancaman fisik terutama usaha-usaha sabotase baik berasal dari dalam maupun dari luar.

-
- 2) Mencegah dan menggagalkan setiap kegiatan sabotase/ pengerusakan dan aksi teror bom terhadap bangunan fisik.
 - 3) Mencegah dan menghindarkan akibat dan kerugian bagi bangunan dari peristiwa bencana alam.
 - 4) Terhadap sasaran area di lingkungan sasaran.
 - 5) Mendeteksi sedini mungkin kemungkinan terciptanya potensi gangguan atau faktor korelatif kriminogen (FKK) di dalam dan di luar lingkungan sasaran.
 - 6) Memberikan masukan menyangkut desain dan penyempurnaan efektivitas sistem pengamanan, meliputi kebutuhan personel, sarana dan prasarannya, berdasarkan hasil deteksi intelijen.
- b. Terhadap sasaran perorangan.
- 1) Melakukan deteksi dini untuk menemukan dan mengidentifisir setiap kegiatan atau tindakan yang dapat membahayakan dan merugikan personel/perorangan dengan jalan pulbaket melalui teknik wawancara dan interogasi.
 - 2) Meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan adanya kegiatan atau tindakan lawan dengan teknik:
 - Pengebalaan personel/perorangan terhadap usaha penggalangan lawan.
 - Peningkatan kewaspadaan terhadap personel/perorangan yang berbahaya.
 - 3) Mencegah dan menggagalkan setiap kegiatan penggalangan/subversi lawan yang ditujukan terhadap perorangan.
 - 4) Mencegah dan menghindarkan bahaya dan kerugian bagi perorangan dari peristiwa bencana alam.
 - 5) Mengikuti perkembangan "*Steaming Belt*" (kisaran suara) dikalangan personel/perorangan.
 - 6) Mengefektifkan pengawasan terhadap orang asing yang bekerja di obvit/obvitnas.

- c. Terhadap sasaran kegiatan/hasil produksi dan distribusi.
- 1) Melakukan deteksi sedini mungkin terhadap perkembangan situasi dan kondisi yang menyangkut kegiatan/proses maupun hasil produksi dan distribusi.
 - 2) Mencegah dan menggagalkan usaha-usaha pembuatan dan tindakan penyimpangan (penimbunan, pencurian) dari pihak-pihak tertentu yang dapat mengganggu operasionalisasi maupun merugikan masyarakat pengguna.
 - 3) Mengawasi terhadap mekanisme pemasukan, pendistribusian, penyimpanan dan penggunaan handak.
 - 4) Menemukan dan mengungkap setiap kegiatan dan tindakan yang dapat mengganggu dan merugikan kegiatan maupun penyaluran hasil produksi dengan jalan pengumpulan bahan keterangan melalui teknik wawancara, interogasi dan penelitian terhadap barang bukti.

2.4 Kerangka Berpikir

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir



BAB III

KONDISI FAKTUAL

3.1 Kondisi Awal

3.1.1 Deskripsi Satintelkam Polres Karanganyar dan permasalahannya

Polres Karanganyar merupakan salah satu Polres yang berada di daerah Jawa Tengah dan merupakan Bagian dari Kepolisian Daerah Jawa Tengah. Polres Karanganyar saat ini dipimpin oleh seorang Kapolres bernama AKBP Danang Kuswoyo, S.I.K. dengan luas wilayah sebesar 77.378,64 Ha dan terbagi dalam 17 kecamatan serta 17 Polsek dengan data wilayah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Data Wilayah Kabupaten Karanganyar

NO	KECAMATAN	KETINGGIAN DARI PERMUKAAN LAUT (Meter)	LUAS WILAYAH (Ha)	JUMLAH PENDUDUK
1	2	3	4	5
1	Jatipuro	770	3.436,5	37.522
2	Jatiyoso	950	6.716,5	42.518
3	Jumapolo	470	5.567	52.557
4	Jumantono	450	5.355,4	50.883
5	Matesih	450	2.626,6	45.248
6	Tawangmangu	1.200	7.003,2	46.817

1	2	3	4	5
7	Ngargoyoso	880	6.533,9	32.372
8	Karangpandan	500	3.411,1	44.572
9	Karanganyar	320	4.302,6	86.102
10	Tasikmadu	140	2.259,7	64.295
11	Jaten	98	2.554,8	85.583
12	Colomadu	140	1.564,2	63.661
13	Gedongrejo	150	5.680	81.590
14	Kebakramat	95	3.645,6	65.717
15	Mojogedang	403	5.330,9	71.549
16	Kerjo	450	4.682,3	38.844
17	Jenawi	750	5.608,3	28.243
Jumlah		8.216	76.278,6	93.807,3

Sumber : Website Badan Pusat Statistik Kabupaten Karanganyar

Sesuai dengan tugas pokok Polri untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang - undang Kepolisian No.2 tahun 2002 pasal 13, Polres Karanganyar melaksanakan tindakan kepolisian berupa preemtif, preventif dan represif untuk memenuhi dan menjalankan tugas pokok tersebut. Dalam melaksanakan tindakan kepolisian preemtif dan preventif, satuan fungsi Intelkam juga ikut berperan dalam melaksanakan tugasnya guna menjaga harkamtibmas. satuan fungsi Intelkam mencakup bidang Ideologi,

Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan keamanan (IPOLEKSOSBUDKAM).

Kondisi kamtibmas Polres Karanganyar di bidang Ipoleksosbudkam sebagaimana dijelaskan oleh satuan Intelkam berdasarkan hasil dari wawancara kepada kasat Intelkam Iptu Ali Suryadi, S.H. menemukan bahwa Satuan fungsi intelijen telah melakukan upaya-upaya penggalangan untuk menjaga situasi Kamtibmas di Polres Karanganyar.

“masyarakat Karanganyar sangat mendukung tugas kepolisian di Karanganyar. Namun dalam kegiatan aktivitas masyarakat ini memang perlu diperhatikan terkait dengan perguruan silat, perguruan silat itu memang banyak hal yang perlu digalang. Ketika perguruan silat itu dari Pagar Nusa, PSHT, Kera Sakti, Winongo dan seluruh perguruan pencak silat yang totalnya ada 12 yang terdaftar dalam IPSI di Kabupaten Karanganyar harus kita kumpulkan supaya dapat menjaga harkamtibmas.”

Satuan Intelkam di Polres Karanganyar terbagi menjadi 4 (empat) unit, diantaranya: 1. Politik, 2. Ekonomi, 3. Sosial budaya, 4. Keamanan negara. Berdasarkan tupoksi masing-masing anggota sebagai fungsi Satuan Intelijen sangat memerankan tugas pokok fungsi dan peran dari masing-masing unit tersebut.

Dalam hasil wawancara penulis menarik beberapa kondisi yang dijelaskan sebagai berikut: Pada Bidang ekonomi terkait dengan harga ataupun kebutuhan bahan pokok pangan masyarakat yang ada di wilayah hukum Polres Karanganyar relatif kondusif, tidak ada harga yang signifikan terkait dengan kebutuhan bahan pokok pangan yang ada di wilayah Kabupaten Karanganyar. Bidang politik, khususnya bidang politik di era sekarang yang termasuk pada kualifikasi partai politik terkait dengan kegiatan KPU yang ada di Kabupaten

Karanganyar. Bawaslu dari unit politik sedang gencar dan terus berperan aktif dalam menjaga keamanan, dikarenakan adanya beberapa relawan partai politik masuk dalam wilayah Kabupaten Karanganyar. Satuan Intelkam terus memonitoring dan mengumpulkan baket agar wilayah Kabupaten Karanganyar tetap pada suatu iklim harkamtibmas yang kondusif.

Pada Bidang sosial budaya, sosial budaya dalam kegiatan masyarakat selalu dimonitoring oleh Polres Karanganyar agar masyarakat yang akan melaksanakan giat baik kegiatan mantu, kegiatan olahraga atau kegiatan masyarakat lainnya tetap selalu kondusif. Demi menciptakan kondisi yang aman dan damai, masyarakat dihimbau sebelum melakukan kegiatan agar melakukan koordinasi dengan Polres Karanganyar agar kegiatan berjalan sesuai yang diharapkan.

Bidang keamanan negara, satuan intelkam memantau 17 eks narapidana teroris dengan mengawasi dan melakukan penggalangan agar ke-17 eks narapidana teroris dapat bersosialisasi dan bersikap merah putih sebagai keamanan khusus. Unit kewanman umum memantau 12 perguruan pencak silat dan membentuk forum silatutrahmi antar ketua perguruan agar situasi bisa berjalan kondusif.

Selain beberapa fokus permasalahan di atas yang terus dimonitoring dan dipantau oleh Satintelkam Polres Karanganyar, konflik Perguruan Pencak Silat juga merupakan konflik yang cukup sering terjadi dan berdampak pada banyak hal terutama keamanan dan kenyamanan masyarakat di Kabupaten Karanganyar. Organisasi perguruan pencak silat sangat mendominasi dalam setiap kegiatan masyarakat di Kabupaten Karanganyar, sehingga Satintelkam terus mencoba mencari solusi dalam penyelesaian konflik tersebut.

Peristiwa tindak pidana maupun konflik sosial yang terjadi di wilayah kabupaten Karanganyar membuat satuan Intelkam terus melakukan penyelidikan, penggalangan maupun pengamanan guna menjaga dan mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif. Dalam menjaga keamanan tersebut, adapun karakteristik wilayah kerawanan Kabupaten Karanganyar sebagaimana yang telah digambarkan oleh unit IV keamanan negara sebagai berikut:

Gambar 3.1

peta Karakteristik Kerawanan Daerah Kabupaten Karanganyar



Berdasarkan data yang diberikan gambaran kondisi kamtibmas wilayah hukum Polres Karanganyar secara umum dapat dinilai kondusif dengan kondisi dan karakter masyarakat yang kooperatif dan budaya toleransi yang sangat baik dari masyarakat Kabupaten Karanganyar. Namun dengan kondisi letak geografis yang ada

berdasarkan peta tersebut, bahwa karanganyar rawan akan bencana alam seperti tanah longsor terutama pada wilayah kecamatan tawamangu. Di wilayah Tawamangu juga rawan terjadi kecelakaan dengan kondisi jalan menanjak dan berliku-liku.

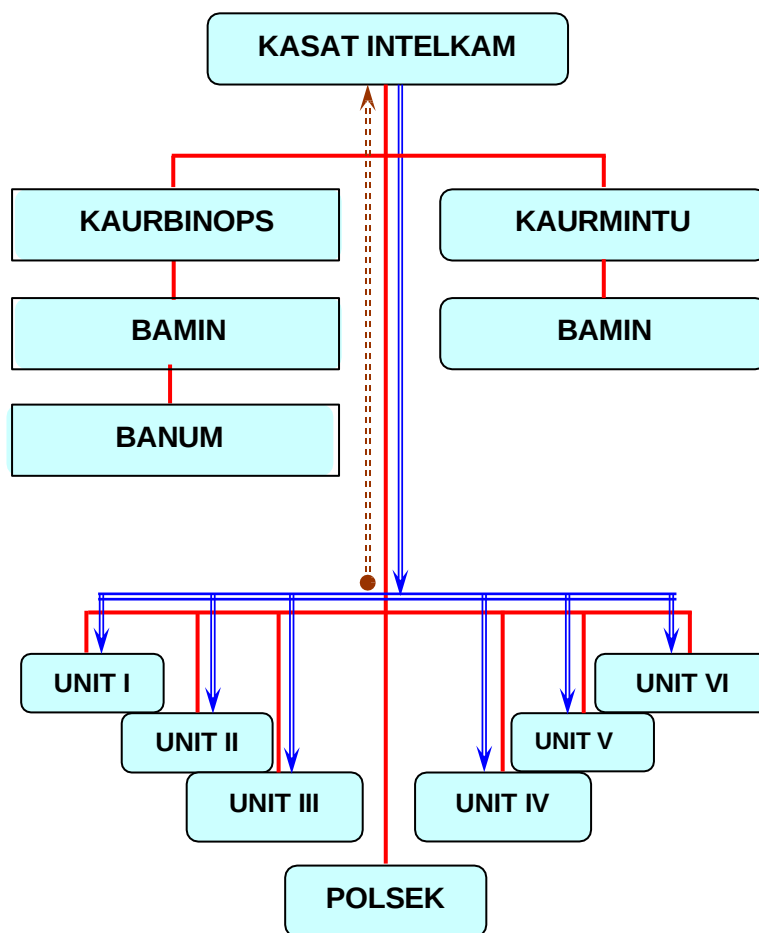
3.1.2 Profil Satuan Intelijen Keamanan Polres Karanganyar

Satuan intelijen Keamanan (Intelkam) adalah unsur pelaksanaan utama Polres yang berada di bawah Kapolres. Satuan Intelkam Polres Karanganyar dipimpin oleh Kepala Satuan Intelkam, disingkat Kasat Intelkam. Kasat Intelkam Polres Karanganyar bertanggung jawab langsung kepada Kapolres Karanganyar dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Waka Polres. Satuan Intelkam bertugas menyelenggarakan dan membina Fungsi Intelijen bidang keamanan, termasuk perkiraan Intelijen, persandian, pemberian pelayanan dalam bentuk surat ijin / keterangan yang menyangkut orang asing, senjata api dan bahan peledak, kegiatan sosial politik masyarakat dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) kepada masyarakat serta melakukan pengamanan, pengawasan terhadap pelaksanaannya. Satuan Intelkam terdiri dari urusan pembinaan operasional Intelkam, urusan administrasi dan tata usaha Intelkam, urusan pelayanan administrasi Intelkam, serta unit operasional yang dipimpin oleh 4 kepala unit dalam melaksanakan tugasnya dengan membidangi bidang Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Keamanan (IPOLEKSOSBUDKAM).

Unit operasional Intelkam Polres Karanganyar terbagi dalam 4 unit yang terdiri dari unit I yang membidangi bidang Politik, Unit II yang membidangi Bidang Ekonomi, Unit III membidangi bidang Sosial Budaya dan unit IV yang membidangi bidang Keamanan Negara. Dalam menjalankan tugasnya yang terdiri dari Penyelidikan Intelijen,

penggalangan dan Keamanan Intelijen, satuan Intelkam Polres Karanganyar memiliki Struktur Organisasi sebagai berikut:

Gambar 3.2
Struktur Organisasi Satuan Intelkam Polres Karanganyar



Sumber : Urmintu Satintekam Polres Karanganyar

Penyelenggaraan Tugas pokok dan fungsi Satuan Intelkam Polres Karanganyar diperlukan adanya kerjasama dan koordinasi antar komponen atau unsur-unsur baik secara Vertikal maupun Horizontal serta Internal Polres Bima maupun Eksternal (Lintas Sektoral/Instansi Samping) yang berpedoman dan diatur sesuai

dengan Undang-undang dalam bentuk Hubungan Tata Cara Kerja (HTCK) Sat Intelkam Polres Karanganyar. HTCK Sat Intelkam merupakan penjabaran dari Tupoksi, wewenang, peranan, koordinasi dan tanggung jawab bagi Anggota Polri di Lingkungan Sat Intelkam Polres Karanganyar sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Undang-undang yang berlaku dalam Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas kinerja Anggota agar lebih Profesional dan proporsional sehingga mampu memberikan input bagi Pimpinan secara maksimal. Sesuai dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 1 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan kepolisian Sektor yaitu: Satuan Intelkam memiliki jumlah personel sebanyak 33 personel dan di kepalai oleh Kasat Intelkam. Dalam menjalankan tugasnya kasat Intelkam dibantu oleh Kaur Bin Opsnal (KBO) Intelkam, Pauryanmin, Kaurmintu dan beberapa Kepala Unit.

Satuan Intelkam Polres Karanganyar secara kualitas dapat dilihat dari sumber lulusan pendidikan kepolisian yang dijalani dan sumber pendidikan umum yang dimiliki oleh personel Satuan Intelkam. Berikut adalah data kualitas personel Satuan Intelkam Polres Karanganyar berdasarkan sumber lulusan pendidikan kepolisian dan pendidikan umumnya.

Tabel 3.2

Data Kuat Pers Intelkam Kewilayahan Berdasarkan Pendidikan Polri
Polres karanganyar

NO	POLRES/POLSEK	JUMLAH PERS	DIKTUK/DIKMA					DIKUM			
			SEBA	AGOL	SIP	SIPSS	AKPOL	SMA	D3	S1	S2
1	POLRES KARANGANYAR	32	27	3	2			15		16	1
2	POLSEK COLOMADU	3	3					2		1	
3	POLSEK GONDANGREJO	3	3					3			
4	POLSEK KEBAKKRAMAT	3	3					2		1	
5	POLSEK JATEN	2	2	1				1		1	
6	POLSEK TASIKMADU	2	2					2			
7	POLSEK KARANGANYAR	3	3					2		1	
8	POLSEK KARANGPANDAN	2	2					1		1	
9	POLSEK NGARGOYOSO	2	2					2			
10	POLSEK JENAWI	2	2					1		1	
11	POLSEK MATESIH	2	2					2			
12	POLSEK TAWANGMANGU	3	3					3			
13	POLSEK KERJO	2	2					2			
14	POLSEK MOJOGEDANG	2	1					1		1	
15	POLSEK JUMANTONO	2	1					1		1	
16	POLSEK JUMAPOLO	2	2					1		1	
17	POLSEK JATİYOSO	2	1					1		1	
18	POLSEK JATIPURO	2	2					2			
JUMLAH TOTAL		71	63	4	2			44		26	1

Sumber : Urmintu Sat Intelkam Polres Karanganyar

Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa Polres Karanganyar memiliki 32 anggota personel dengan 5 personel berpangkat Perwira dan 27 sisanya berpangkat Brigadir. Sebanyak 3 bersumber dari Sekolah Ahli Golongan (ALGOL), 2 personel bersumber dari Sekolah Inspertur Polisi (SIP) dan sebanyak 27 sisanya merupakan lulusan Bintara. Dilihat dari pendidikan umumnya, maka sebanyak 16 personel telah menjalani pendidikan umum strata 1, 1 personel bergelar strata 2 dan 15 personell lainnya belum melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya.

3.1.2.1 Anggaran Sat Intelkam Polres Karanganyar

Pencapaian pelaksanaan tugas operasional Satuan Intelkam tidak lepas dari dukungan anggaran guna mendukung kegiatan pembinaan, perawatan maupun operasional Satuan Intelkam yang bersumber dari DIPA Polri. Dukungan Anggaran Digunakan untuk keperluan kegiatan Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan serta Pelayanan Kepolisian. Berikut Anggaran yang ada pada Satuan Intelkam Polres Karanganyar Tahun 2022 :

Tabel 3.3

Anggaran DIPA Satuan Intelkam Polres Karanganyar

NO	JENIS KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1.	Pemeliharaan Sarana dan Parasarana	Rp.17.343.000	1 Tahun
2.	Peralatan Inteltek	Rp.3.659.000	1 Tahun
3.	Pemeliharaan Alsus	Rp.4.640.000	1 Tahun
4.	Pemeliharaan Alkom	Rp.4.744.000	1 Tahun
5.	Penyelenggaraan Lidik	Rp.4.300.000	1 Tahun
6.	Penyelegraan Pam	Rp.336.000.000	1 Tahun
7.	Penyeleengaraan Gal	Rp.293.080.000	1 Tahun
8.	Honor Benma	Rp. 8.400.000	1 Tahun
9.	Pelayanan perijinan	Rp.140.525.000	1 Tahun
	Jumlah	Rp.793.548.000	1 Tahun

Sumber: Urmintu Sat Intelkam Pores Karanganyar

Satintelkam Polres Karanganyar memiliki anggaran sebesar Rp. 793.543.000. Dalam pelaksanaan tugas Intelkam diperlukan anggaran penyelenggaraan lidik, pam serta gal. Anggaran dalam pelaksanaan deteksi dini dan penyelidikan sebesar Rp. 4.300.000, dalam pelaksanaan pengamanan sebesar Rp. 336.000.000, dan pelaksanaan penggalangan sebesar Rp. 293.080.000. Penyerapan anggaran yang tersedia disesuaikan dengan kalender Kamtibmas dan kebutuhan yang diperlukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

3.1.2.2 Sarana dan Prasarana Satuan Intelkam Polres Karanganyar

Sarana dan prasarana satuan intelkam Polres Karanganyar digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan rutin maupun kegiatan operasional Satuan Intelkam Polres Karanganyar. Tujuan dari sarana dan prasarana adalah untuk menunjang dan memudahkan satuan intelkam dalam pelaksanaan tugasnya. Sarana dan prasarana dari satuan intelijen berupa fasilitas kendaraan, administrasi, alat komunikasi dan alat bantu khusus. Sarana dan Prasarana satuan intelkam juga dilengkapi dengan alat keamanan khusus guna menunjang pelaksanaan tugas dan menjaga kerahasiaan informasi sehari-hari satuan Intelkam. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Satintelkam belum cukup untuk memadai seluruh kegiatan intelijen di Polres Karanganyar.

3.2 Deteksi Dini Satuan Intelkam Guna Mencegah Konflik antar Organisasi Pencak Silat di Wilayah hukum Polres Karanganyar

Deteksi dini merupakan tugas intelijen dalam menemukan indikasi/gejala, tanda-tanda peristiwa, permasalahan dan mengidentifikasi sasaran, korban serta orang /Lembaga yang terlibat kedalam suatu permasalahan maupun kasus, begitu juga yang sedang dilakukan oleh Satuan Intelijen Polres Karanganyar dalam mengatasi konflik antar organisasi perguruan pencak silat. Dalam melaksanakan deteksi dini konflik

perguruan pencak silat, Satintelkam Polres Karanganyar melakukannya dengan beberapa tahapan yang dimulai dari tahapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian.

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan oleh penulis, Satintelkam Polres Karanganyar melakukan tahapan tersebut sebagai berikut:

1. Perencanaan (*Planning*)

Satintelkam Polres karanganyar sebelum melaksanakan Deteksi dini tentunya akan membuat perencanaan terlebih dahulu. Berdasarkan wawancara dengan KBO Intelkam Polres Kranganyar Iptu Budi Santoso, S.H mengatakan bahwa:

“Sebelum membuat perencanaan tentunya kita harus mempunyai data casing mengenai perguruan pencak silat terlebih dahulu, contohnya seperti struktur organisasi PSHT. Setelah memiliki struktur organisasi kita menyesuaikannya dengan undang-undang, apakah mereka telah terdaftar sebagai organisasi resmi atau belum. Setelah semua itu dimiliki barulah kita menyusun perencanaan untuk kegiatan berikutnya.

2. Pengorganisasian (*Organization*)

Pengorganisasian atau pembagian tugas dalam satuan intelkam merupakan pembagian tugas dari kasat kepada kanit maupun dari kanit kepada anggota. Pembagian tugas akan disesuaikan dengan bidang masing-masing yang diemban oleh para kanit, kemudian para kanit akan membagi lagi tugas kepada anggota disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki oleh anggota personal unit. Pembagian tugas kepada personel secara tepat berpengaruh pada hasil informasi dan bahan keterangan yang berkualitas.

Satuan Intelkam Polres dalam pengorganisasian melakukan pembagian tugasnya sesuai dengan bidangnya, seperti yang diterima oleh unit IV Satintelkam Polres Karanganyar. Unit IV melaksanakan tugasnya dalam bidang keamanan sehingga pada pelaksanaan deteksi dini perguruan pencak silat diemban oleh unit IV. Kanit IV membagi tugas mengenai deteksi perguruan pencak silat sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh anggotanya, seperti tugas yang diterima oleh salah satu anggota unit IV Briptu Bagus Setyanto, S.H. yang juga merupakan warga dari salah satu perguruan pencak silat yang ada di Kabupaten Karanganyar. Briptu Bagus Setyanto, S.H. menjalankan penggalangan di dalam perguruan pencak silat secara *clandestine*.

3. Pelaksanaan (*Actuating*)

Satuan intelijen sebagai fungsi yang mengawali, menyertai dan mengakhiri setiap perkembangan kamtibmas melalui deteksi dini, peringatan dini dan pencegahan dini yang diwujudkan dalam bentuk penyelidikan, pengamanan dan penggalangan intelijen. Pelaksanaan deteksi dini yang dilakukan oleh Satintelkam Polres Karanganyar guna memenuhi peran dari fungsinya tersebut terus dilaksanakan setiap saat dalam kondisi dan situasi apapun. Berdasarkan potensi gangguan 2022 di bidang keamanan yang diperoleh dari Satintelkam Polres Karanganyar adalah gesekan antara komunitas ormas perguruan silat di wilayah kabupaten Karanganyar yang Sebagian besar terdiri dari remaja di bawah umur yang masih memiliki jiwa nasional yang tinggi, maka dari itu Satintelkam Polres Karanganyar terus melakukan upaya deteksi dini sebagai langkah pencegahan.

Ketika satintelkam Polres Karanganyar telah menerima informasi mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perguruan pencak silat, satintelkam langsung melakukan penafsiran dan Analisa terkait kegiatan yang akan berlangsung agar harkamtibmas masyarakat tetap terjaga dan

kondusif. Satintelkam Polres Karanganyar melakukan pulbaket dan koordinasi kepada ketua cabang, ketua ranting, sub ranting dan seluruh elemen yang terlibat. Kemudian satintelkam akan mengundang para ketua cabang maupun ketua ranting yang terlibat beserta IPSI untuk melaksanakan koordinasi terkait pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan. Intinya satintelkam melakukan upaya deteksi dini, koordinasi, penggalangan agar pada saat berlangsungnya kegiatan pengamanan dapat dilaksanakan dengan baik serta kegiatan berjalan dengan lancar.

4. Pengendalian (*Controlling*)

Pelaksanaan deteksi dini tidak lepas dari pelaksanaan pengendalian. Pengendalian dilakukan guna memantau anggota dalam melaksanakan tugas deteksi dini maupun memantau kegiatan di lapangan. Satintelkam Polres Karanganyar melakukan pengendalian terhadap anggota yang sedang melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk melakukan deteksi, koordinasi, komunikasi dan penggalangan. Pada era modern sekarang, pemantauan dan pengendalian terhadap anggota dapat dilakukan secara langsung melalui sosial media *WhatsApp*. Kasat Intelkam Polres Karanganyar dalam hal ini telah membuat sebuah grup *WhatsApp* yang berisikan anggota dan para kanit sebagai bentuk sarana kontrol, selain itu juga grup tersebut ditujukan pada anggota personal lain memonitor perkembangan situasi di lapangan. Anggota melaporkan setiap kegiatan dan informasi melalui grup secara langsung dan akurat menjadi sarana kontrol yang baik buat kasat.

Kasat Intelkam Polres Karanganyar juga mengontrol anggota dengan melakukan pengecekan terhadap pelaporan yang dituangkan anggota intelkam melalui produk intelkam. Proses pemeriksaan produk intelkam juga bertahap, pertama produk diberikan kepada kanit untuk dilakukan pemeriksaan. Setelah produk dinilai baik oleh kanit, kanit akan menyerahkan produk tersebut kepada Kbo Intelkam untuk diperiksa guna menghindari kesalahan dalam penulisan produk intelijen. Setelah produk dinyatakan baik, Kbo intelkam akan menyerahkan kepada kasat untuk

disajikan kepada pimpinan tertinggi yakni Kapolres sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

Pengendalian terhadap kegiatan di lapangan, contohnya seperti melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap perguruan pencak silat yang akan melakukan kegiatan guna menghindari terjadinya gesekan maupun konflik dengan perguruan pencak silat lain. Pengendalian terhadap kegiatan pencak silat dengan mengumpulkan ketua dan tokoh-tokoh perguruan pencak silat kemudian satintelkam memberikan suatu prasyarat yang akan tertuang dalam surat kesepakatan sebagai bentuk kontroling yang dilakukan oleh Satintelkam Polres Karanganyar. Surat perjanjian tersebut akan menjadi rambu peringatan bagi perguruan pencak silat yang akan melakukan kegiatan. Selain pengendalian kegiatan, Satintelkam Polres Karanganyar juga melakukan kontrol terhadap seluruh perguruan dengan pendekatan terhadap seluruh ketua perguruan pencak silat yang ada di Kabupaten Karanganyar.

3.3. Penyelesaian Konflik Perguruan Pencak Silat oleh Satuan Intelkam Polres Karanganyar

Fenomena konflik perguruan pencak silat di Wilayah Kabupaten Karanganyar yang terus menerus terjadi dan bermunculan dengan berbagai permasalahan baru, mulai dari konflik antar individu, kelompok bahkan antar internal perguruan pencak silat itu sendiri. Konflik yang terjadi tentu saja menjadi ancaman kamtibmas dikarenakan mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Konflik perguruan pencak silat juga telah banyak memakan korban baik dari segi materi maupun korban jiwa. Menyikapi hal tersebut personel Polres Karanganyar melakukan pendekatan represif dengan menegakan hukum sesuai Undang-undang KUHP seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 3.4
Data Penegakan Hukum Terhadap Pihak Berkonflik di Wilayah
Hukum Polres Karanganyar Tahun 2019 – 2022

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2019	1	1 Tuntas Sesuai KUHP 1 Proses
2	2020	3	3 Tuntas Sesuai KUHP
3	2021	7	3 Tuntas Sesuai KUHP 1 Restorative 3 Proses
4	2022	9	1 Tuntas Sesuai KUHP 3 Restorative 5 Proses
TOTAL		20	8 Tuntas Sesuai KUHP 5 Restorative 8 Proses

Sumber: Satreskrim Polres Karanganyar

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa Polres Karanganyar telah melakukan pendekatan represif dengan menegakan hukum formal sesuai dengan KHUP namun belum juga memberikan efek jera dan rasa takut akan hukum yang telah ditegakkan oleh Polres Karanganyar. Selain penegakkan hukum dengan melalui KUHP, Polres Karanganyar telah melakukan Tindakan *Restorative Justice* sesuai dengan *commander wish* Kapolri dalam transformasi Polri menuju Polri yang Presisi guna mencegah konflik berkelanjutan. Dengan dilakukannya *Restorative Justice* diharapkan dapat meningkatkan hubungan antara perguruan pencak silat karena telah bertatap muka dan menjalin hubungan secara tidak langsung.

Satuan Intelkam juga membantu dalam penyelesaian konflik yang terjadi antar perguruan pencak silat. Satuan Intelkam membantu Satuan Reserse dalam penyelidikan dengan mengungkap pelaku dari konflik yang telah terjadi. Berdasarkan dengan hasil wawancara terhadap KBO Satintekam Polres karanganyar Iptu Budi Santoso, S.H., menyatakan bahwa :

“...ketika ada pelaporan maupun pengaduan kepada Satreskrim tetap akan dilaksanakan penegakkan hukum dari Polres Karanganyar. Kemudian terkait pengaduan masyarakat yang menjadi korban dari konflik pencak silat, itu kita melakukan deteksi dengan membantu Satreskrim apa bila pelaku belum teridentifikasi dengan jelas, Kami membantu menemukan

Pelaku pengeroyokan maupun pelaku yang terlibat dalam konflik perguruan pencak silat tersebut.”

Selain dengan penegakkan hukum secara represif dari Satreskrim, Satintelkam juga telah berupaya dengan mengumpulkan seluruh ketua cabang perguruan pencak silat Se-kabupaten Karanganyar melalui IPSI terkait penyelesaian konflik perguruan pencak silat maupun mempertemukan para tokoh untuk menjalin komunikasi dan menjaga kondisi kamtibmas.

3.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Deteksi Dini Satuan Intelkam Guna Mencegah Konflik Antar perguruan Pencak Silat

Deteksi dini dalam pelaksanaannya tidak lepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Agar pelaksanaan deteksi dini dapat berjalan dengan lancar dan optimal tentu saja ada faktor pendukung yang mendorong kelancaran pelaksanaan deteksi dini tersebut. Begitupun sebaliknya, ada juga hal-hal yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan deteksi dini satuan intelkam. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat pelaksanaan deteksi dini satuan intelijen, peneliti menggunakan teori SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity* dan *Threats*). Faktor yang mempengaruhi deteksi dini dapat dilihat dan dibagi menjadi 2 faktor yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor-faktor yang mempengaruhi deteksi dini tersebut diantara lain :

3.2.1. Faktor Internal

Keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan deteksi dini yang berasal dari dalam tubuh satuan intelkam Polres Karanganyar disebut sebagai faktor Internal. Unsur yang terkandung dalam faktor Internal meliputi *strength* (kekuatan) dan *weakness* (kelemahan). Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di Polres Karanganyar, maka faktor internal dalam deteksi dini satuan intelkam adalah sebagai berikut:

a. *Strength* (Kekuatan)

1. Pengalaman dan pengetahuan personel unit kamneg

Pada pelaksanaan deteksi dini satuan intelkam khususnya pada konflik pencak silat dilakukan oleh unit IV Kamneg. Unit IV Kamneg memiliki 5 anggota personel yang dipimpin oleh seorang perwira Ipda Untung Basuki, S.H., unit IV memiliki 3 anggota yang mempunyai gelar sarjana sehingga memiliki pengetahuan lebih luas. Selain itu juga, didalam unit IV terdapat satu anggota senior Berpangkat Bripka yang tentunya memiliki pengetahuan dan pengalaman lebih dalam pelaksanaan deteksi dini khususnya terhadap konflik perguruan pencak silat. Dari segi pengetahuan yang dimiliki oleh anggota unit IV, mereka mampu memahami karakteristik dari masing-masing perguruan pencak silat sehingga dapat di prediksi dari setiap tingkah laku maupun kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu perguruan pencak silat.

2. Jaringan Intelijen

Early Detection (peringatan dini) terkait konflik perguruan pencak silat yang di dapatkan oleh satuan intelijen berasal dari jaringan intelijen yang telah dibentuk. Pembentukan jaringan intelijen yang dilakukan oleh unit IV Kamneg sat intelkam guna memperluas tambahan informasi terkait konflik perguruan pencak silat di wilayah Kabupaten Karanganyar. Unit IV Kamneg telah membentuk jaringan informasi terhadap anggota masing-masing perguruan pencak silat. Unit IV melaksanakan Langkah ini guna memonitor pergerakan dan kegiatan serta aktivitas yang dilakukan oleh perguruan pencak silat agar Satintelkam dapat terus menjaga dan memastikan kondusifitas perguruan pencak silat serta kamtibmas Kabupaten karanganyar. Jaringan intelijen yang telah dibentuk oleh unit IV dapat dilihat pada buku jaringan intelijen yang dimiliki oleh unit IV Kamneg.

3. Anggota Satuan Intelkam yang Merupakan Anggota Perguruan

Anggota Satuan Intelkam Polres Karanganyar juga ada beberapa yang merupakan anggota dari perguruan pencak silat. Ada yang menjadi anggota perguruan sebelum ia bergabung menjadi anggota polisi, ada juga yang memang sengaja diikuti menjalani proses menjadi anggota perguruan. Untuk yang menjadi anggota perguruan dia mengikuti berbagai latihan, mulai dari awal latihan dasar hingga pengesahan menjadi warga anggota perguruan pencak silat. Berdasarkan dengan wawancara yang dilakukan kepada anggota unit IV Satuan Intelkam Polres karanganyar, Briptu Bagus Setiyanto, S.H., mengatakan bahwa:

“...saya terjun langsung untuk mengikuti latihan dari awal latihan dasar hingga pengesahan menjadi warga perguruan pencak silat. Awalnya mereka menolak dan memisahkan latihan saya karena mereka mengetahui saya merupakan anggota Polri tetapi saya mengatakan bahwa saya ingin benar-benar menjalani latihan sebenarnya. Setelah saya mengatakan hal tersebut baru mereka memperbolehkan latihan seperti dengan yang lainnya. Saya menjalani latihan dari awal latihan dasar hingga pengesahan itu memakan waktu 1 tahun.”

Adanya anggota dari Satintelkam yang menjadi anggota perguruan akan mempermudah Satintelkam untuk melaksanakan deteksi dini dan juga mempermudah Satintelkam untuk menjalin komunikasi serta hubungan kepada perguruan pencak silat.

b. *Weakness* (Kelemahan)

1. Jumlah personel

Jumlah personel dalam pelaksanaan tugas intelijen tentunya menjadi kendala bagi satuan intelkam dalam melaksanakan tugasnya. Polres karanganyar merupakan Polres tipe D, yang bila disesuaikan dengan kebutuhan personel sesuai Daftar Susunan

Personel (DSP) yang termuat dalam Peraturan Kepolisian negara Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor. Unit IV satuan intelkam saat ini beranggotakan sebanyak 5 personel dengan susunan 1 kepala unit (kanit) dan 4 bintang unit (banit). Jika disesuaikan dengan DSP, maka seharusnya jumlah anggota banit dalam satu unit itu berjumlah 10 banit.

Kurangnya jumlah personel dalam unit IV tentunya akan berpengaruh pada pelaksanaan deteksi dini dan penyelidikan konflik perguruan pencak silat. Jumlah anggota yang dimiliki tidak dapat mengcover seluruh wilayah Polres Karanganyar, karena perguruan pencak silat telah tersebar ke seluruh wilayah Polres Karanganyar. Sehingga para anggota harus bisa memilah untuk memprioritaskan pelaksanaan deteksi dini dan penyelidikan sesuai dengan situasi dan kondisi kamtibmas yang sedang berkembang pada saat itu agar situasi dan kodisifitas kamtibmas tetap terjaga dan aman terkendali.

2. Sarana dan Prasarana

Pelaksanaan deteksi dini dan penyelidikan tentunya memerlukan alat bantu seperti sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Satuan Intelkam Polres Karanganyar. Sarana dan prasarana yang dimiliki satuan intelkam dalam pelaksanaan deteksi dini dan penyelidikan merupakan alat khusus yang dapat membantu jalannya pelaksanaan deteksi dini. Berdasarkan dari hasil pengamatan dan penelitian yang telah dilaksanakan, dapat dinilai bahwa ketersediaan alsus yang dimiliki oleh Satuan Intelkam Polres Karanganyar masih kurang dan belum mampu mengimbangi kebutuhan intelijen saat ini.

3. Produk Intelijen

Semua hasil dari pelaksanaan tugas intelijen pada akhirnya akan berupa produk intelijen atau laporan intelijen. Pelaksanaan penyelidikan, penggalangan dan pengamanan intelijen akan dituangkan kedalam produk intelijen yang nantinya akan disampaikan kepada pimpinan sebagai laporan intelijen untuk kemudian menjadi bahan pertimbangan kepada pimpinan yang kemudian akan ditindak lanjuti oleh pimpinan. Produk intelijen juga akan dilakukan pengarsipan produk intelijen oleh Urmintu Satintelkam agar memudahkan *user* (pengguna) dalam melihat produk intelijen yang ingin dilihat serta mempermudah pimpinan atau tim pengawas dan pemeriksaan (*wasrik*) dalam melihat siklus intelijen. Urmintu akan mengelompokkan dan mengklasifikasikan produk intelijen kemudian diletakkan dalam lemari penyimpanan produk intelijen yang sudah dibuat oleh urmintu sat intelkam. Urmintu bukan hanya menyimpan serta mengklasifikasikan produk intelijen tetapi urmintu juga ikut berperan dalam pelaksanaan pembuatan laporan-laporan serta produk intelijen lainnya. Berdasarkan wawancara dengan Ka Urmintu Satuan Intelkam Polres Karanganyar Aiptu Kasdi, mengatakan bahwa :

“...kami dari urmintu juga ikut membantu dalam pembuatan produk-produk dan mengagendakan kegiatan dalam buku register untuk mengontrol kegiatan intelijen yang kemudian di arsipkan. Pada pembuatan produk misalnya pembuatan kir, kami mengalami kendala dalam menunggu pelaporan dari para unit karena kami tidak bisa membuat suatu kir tanpa adanya informasi dari para unit-unit intelijen. Kir sangat berperan karena suatu kegiatan belum bisa berjalan tanpa adanya kir. Namun apa bila ada suatu hal

yang urgent para unit dapat langsung menyampaikan pelaporan kepada kasat tanpa harus melalui urmintu.”

3.2.2 Faktor Eksternal

Faktor dari luar tubuh intelijen juga sangat berpengaruh dalam keberhasilan pelaksanaan deteksi dini, faktor yang bersumber dari luar tubuh intelijen disebut sebagai faktor eksternal. Unsur yang terkandung dalam faktor eksternal meliputi *Opportunity* (Kesempatan) dan *Threats* (Ancaman). Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di Pores Karanganyar, maka faktor internal dalam deteksi dini satuan intelkam adalah sebagai berikut :

a. *Opportunity* (Kesempatan)

1. Masyarakat Sebagai Sumber Informasi

Peran serta masyarakat dalam memberikan informasi terkait konflik pencak silat sangat berpengaruh dalam pelaksanaan deteksi dini Satintelkam. Kesadaran masyarakat dalam memberikan informasi harus ditingkatkan agar masyarakat dapat menjadi jaringan intelijen yang akan membantu satintelkam dalam menangani konflik antar perguruan pencak silat. Masyarakat akan digalang untuk meningkatkan kesadarannya terkait permasalahan perguruan pencak silat agar pada saat masyarakat melihat kejadian menonjol antar perguruan maupun yang sedang dilakukan suatu perguruan agar segera dilaporkan kepada Polres untuk diantisipasi kegiatan berikutnya.

2. Tokoh Perguruan Sebagai Jaringan Intelijen

Hubungan keakraban dengan para tokoh perguruan yang ada di wilayah Kabupaten Karanganyar dapat mempermudah pelaksanaan deteksi dini Satintelkam dalam pencegahan konflik perguruan pencak silat. Hubungan antara tokoh perguruan dengan Satintelkam akan membantu pelaksanaan monitoring kegiatan perguruan pencak silat serta apa bila terjadi suatu permasalahan

maupun konflik antar perguruan pencak silat, Satintelkam akan menghubungi tokoh dari perguruan yang berselisih guna meredam situasi maupun mengendalikan anggota perguruan miliknya. Para tokoh juga akan menghubungi Satintelkam apa bila akan ada pelaksanaan kegiatan perguruan pencak silat sehingga memudahkan Satintelkam untuk pelaksanaan pengamanan dan antisipasi konflik yang terjadi pada saat kegiatan perguruan pencak silat berlangsung. Berdasarkan dengan wawancara yang dilakukan dengan Kanit IV Satintelkam Polres Karanganyar, Ipda Untung Basuki, S.H. mengatakan bahwa :

“... kami selalu menjalin hubungan baik dengan para tokoh perguruan pencak silat dan juga selalu melakukan koordinasi terkait kegiatan-kegiatan perguruan pencak silat yang ada di Kabupaten Karanganyar. Hal tersebut dilakukan guna mempermudah pelaksanaan tugas Satintelkam dalam menangani konflik perguruan pencak silat yang ada di Karanganyar. Seperti pada saat ada konflik yang terjadi maka kami segera menghubungi tokoh perguruan yang terlibat untuk mengendalikan dan mengarahkan para anggota perguruan miliknya.”

Menjalin hubungan baik dengan para tokoh merupakan upaya yang terus dilakukan oleh Satintelkam Polres Karanganyar agar kondusifitas kamtibmas terus terkendali dan berjalan dengan lancar.

3. Kerjasama dengan IPSI Kabupaten Karanganyar

IPSI selaku badan yang mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan kegiatan terhadap perguruan pencak silat dalam pelestarian, pengembangan, dan peningkatan kualitas serta prestasi pencak silat secara menyeluruh dan berkesinambungan. Satintelkam selalu melakukan koordinasi

dengan IPSI guna mengumpulkan tokoh dari seluruh perguruan pencak silat yang ada di Wilayah kabupaten Karanganyar untuk membuat beberapa perjanjian apa bila terjadi konflik dan juga sebagai sarana kontrol dari kegiatan perguruan pencak silat. Ipsik akan menjadi saksi pada saat melakukan mediasi antar perguruan pencak silat dan juga sebagai badan yang berhak membina perguruan pencak silat. Satintelkam dengan IPSi selalu bekerjasama dalam hal fenomena pencak silat yang terjadi di Wilayah Kabupaten Karanganyar.

b. *Threats* (Ancaman)

1. Perguruan Pencak Silat yang Sulit Diajak Komunikasi

Tahapan dan pelaksanaan deteksi dini memerlukan koordinasi serta komunikasi yang baik antar perguruan pencak silat dengan Satintelkam Polres Karanganyar. Namun pada tahapan pelaksanaan ini pelaksanaan komunikasi sulit untuk dijalani, hal tersebut dikarenakan para perguruan silat susah untuk dihubungi dan tidak mau berkomunikasi.

2. Kurangnya Koordinasi dengan Wilayah kabupaten lain

Pelaksanaan deteksi dini di Wilayah Kabupaten Karanganyar juga memerlukan koordinasi dengan kabupaten lain. Berdasarkan contoh kasus yang telah terjadi bahwa setiap adanya gesekan atau konflik antar perguruan pencak silat, yang terlibat dalam konflik tersebut bukan hanya anggota perguruan pencak silat yang berasal dari kabupaten Karanganyar melainkan juga banyak yang berasal dari Sragen, Surakarta, Sukoharjo dan Boyolali. Sehingga dengan adanya campur tangan dari anggota perguruan pencak silat yang bukan berasal dari Kabupaten Karanganyar maka perlu adanya koordinasi dengan kabupaten lain untuk memantau pergerakan dari perguruan pencak silat tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan Iptu Budi Santoso, S.H., mengatakan bahwa :

“...ada gesekan yang terjadi di wilayah karanganyar terkadang kita tidak berkomunikasi dengan kabupaten wilayah lain. Ketika terjadi gesekan antara perguruan pencak silat yang melibatkan anggota perguruan pencak silat terkadang berasal dari luar wilayah Kabupaten karanganyar.”

BAB IV

LANGKAH-LANGKAH PEMECAHAN MASALAH

4.1. Kondisi yang Diharapkan Terkait Kinerja Satuan Intelkam dalam Melaksanakan Deteksi Dini Guna Mencegah Konflik antar Organisasi Pencak Silat di Wilayah Hukum Polres Karanganyar

Deteksi dini merupakan suatu langkah awal yang dapat mengarahkan dan menentukan langkah kepolisian yang bertindak sangat menentukan keberhasilan Polri sebagai instansi yang paling bertanggung jawab dalam keamanan nasional. Proses deteksi dini Intelkam Polri dilakukan tidak semata-mata dengan produk informasi yang seadanya, akan tetapi telah melalui proses pengolahan data dan juga menggunakan analisis yang mendalam sehingga menghasilkan informasi yang akurat. Pelaksanaan Deteksi Dini harus berpedoman terhadap Peraturan Kapolri No. 1 Tahun 2019 tentang Sistem, Manajemen, dan Standar Keberhasilan Operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur tahapan-tahapan dalam pelaksanaan tugas dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian.

Proses intelijen seperti deteksi dini mutlak dilakukan dalam setiap kasus, begitupun dalam menangani konflik antar organisasi perguruan pencak silat di Karanganyar. Deteksi dini Satuan Intelkam Polres Karanganyar dalam menangani konflik antar organisasi perguruan pencak silat dilaksanakan oleh Unit IV. Hal tersebut dikarenakan Unit IV merupakan Unit bidang Keamanan negara yang mengatasi masalah keamanan umum dan keamanan khusus. Sedangkan Konflik antar perguruan pencak silat merupakan bagian dari keamanan umum yang akan diatasi oleh Unit IV.

Dalam penelitian ini, penulis berpedoman terhadap tahapan penyelidikan dan juga menggunakan teori manajemen POAC (*Planning*,

Organizing, Acutating, dan Controlling). Teori tersebut penulis gunakan sebagai pisau analisis agar penelitian menjadi lebih terarah dengan tetap mengikuti tahapan penyelidikan.

4.1.1 Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan deteksi dini satuan Intelijen dalam pelaksanaannya tentu saja ada proses perencanaan agar pelaksanaan dapat berjalan dengan lancar dan tertib. Berdasarkan Perkabintelkam Polri No.1 tahun 2013 Tentang penyelidikan Intelijen dan diatur dalam Pasal 15 ayat (1) bahwa proses perencanaan itu meliputi perumusan sasaran, Analisa sasaran, Analisa tugas, penyusunan rencana penyelidikan serta pengawasan dan pengendalian kegiatan. Berdasarkan hal tersebut maka proses perencanaan kegiatan deteksi dini antara lain:

a. Merumuskan Sasaran

Proses pelaksanaan deteksi dini ini diawali dengan merumuskan sasaran deteksi dini yakni, perguruan pencak silat beserta komunitas-komunitas perguruan pencak silat. Sesuai dengan Pasal 15 ayat (2) Perkabik No.1 tahun 2013, merumuskan sasaran merupakan kegiatan dalam rangka menentukan sasaran yang didasarkan kepada situasi dan kondisi aktual yang dihadapi. Situasi dan kondisi aktual tersebut yang berhubungan dengan sasaran didapat melalui penjabaran UUK yang telah dibuat oleh Kasatintelkam. Bentuk-bentuk sasaran sesuai Perkap No.1 Tahun 2019 tentang Sistem, Manajemen dan Standar Keberhasilan Operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia terdiri dari: sasaran situasi dengan unsur-unsurnya lokasi, waktu, dan penyebab; sasaran pelaku dengan unsur-unsurnya orang, sindikat, badan hukum, benda atau barang dan kegiatan masyarakat.

Perumusan sasaran didasarkan dengan laporan informasi dan data casing dari target operasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan

Kbo Intelkam Polres Karanganyar Iptu Budi Santoso, S.H. bahwa, perumusan sasaran yang dilakukan oleh Satintelkam Polres Karanganyar memerlukan beberapa tahap diantaranya yaitu, perumusan situasi, lokasi dan unsur penyebab kejadian konflik perguruan pencak silat sehingga didapatkan situasi dan pelaku sasaran. Sasaran situasi dilaksanakan dengan pengumpulan baket dan informasi terkait perguruan pencak silat dan situasi penyebab konflik perguruan pencak silat. Setelah merumuskan sasaran dengan menganalisa situasi serta kondisi perguruan pencak silat kemudian didapatkan kondisi perguruan pencak silat sebagai berikut :

1. Perguruan pencak silat di Kabupaten Karanganyar sampai saat ini yang mendominasi adalah PSHT pusat madiun parluh 17 di banding semua perguruan pencak silat yang ada di wilayah Kabupaten karanganyar.
2. Jumlah perguruan pencak silat yang terdaftar dalam IPSI berjumlah sebanyak 12 perguruan pencak silat.
3. Potensi terjadinya konflik paling besar adalah konflik PSHT antara parluh 17 dengan parluh 16 diakibatkan karena adanya perpecahan internal dari pusat PSHT di madiun.
4. Proses pembentukan dan pelatihan yang keras tanpa adanya pembinaan mental menciptakan emosional anggota perguruan yang tidak stabil dan arogan.
5. Dari semua kasus konflik yang terjadi, semua yang terlibat merupakan remaja yang masih sekolah di jenjang SMP dan SMA.
6. Munculnya komunitas tanpa ketua yang hanya dipimpin oleh admin tanpa pertanggung jawaban dengan mengatasnamakan perguruan silat.
7. Komunitas yang bermunculan di luar ADRT organisasi perguruan pencak silat.

8. Partisipasi anggota perguruan pencak silat diluar dari perguruan Kabupaten Karanganyar yang ikut turun dan terlibat konflik.

Data yang didapatkan dalam perumusan sasaran yang didapatkan oleh Satintelkam Polres Karanganyar sudah baik, dengan situasi dan penyebab konflik sudah terlihat dengan jelas sehingga berikutnya dapat dilakukan analisa sasaran untuk melihat target dari pelaksanaan deteksi dini. Dengan begitu, deteksi dini dapat dilakukan dengan maksimal.

- b. Analisa Sasaran

Analisa sasaran dilakukan guna mengetahui karakteristik dari sasaran target operasi. Sesuai Pasal 15 ayat (3) Perkabik No.1 Tahun 2013 tentang Penyelidikan Intelijen menjabarkan proses perencanaan pada analisa sasaran. Pelaksanaan analisa sasaran dilaksanakan dengan lebih terperinci terkait sasaran sehingga sasaran dapat dikatakan sebagai target operasi. Analisa sasaran yang lebih terperinci meliputi lingkungan daerah tempat tinggal sasaran, hambatan dan rintangan serta fasilitas-fasilitas yang dapat membantu pelaksanaan deteksi dini. Data diri sasaran akan dicari tahu lebih mendalam seperti nama sasaran, tempat tanggal lahir dan alamat.

Analisa sasaran dari deteksi dini perguruan pencak silat adalah para tokoh perguruan beserta admin-admin dari komunitas perguruan tersebut. Jadi sebelum melakukan deteksi dini, Satuan Intelijen harus mempunyai data casing terlebih dahulu sebelum melaksanakan deteksi dini.

Data yang tercantum dalam menganalisis sasaran yang dilakukan oleh Saintelkam Polres Karanganyar sudah baik, pada data target operasi sudah jelas. Tetapi, terdapat kekurangan berupa data dari admin-admin komunitas sebagai penyebab dari permasalahan konflik perguruan pencak silat. Admin-admin merupakan pemimpin

komunitas yang terlibat konflik perguruan pencak silat. Dengan data yang jelas, tentunya akan operasi akan berjalan dengan baik.

c. Menganalisa Tugas Deteksi dini

Menganalisa tugas deteksi dini dilakukan unit IV dengan menelaah disposisi tugas yang diberikan oleh kasat intelkam, melihat data-data target sasaran dan penalaran Unsur-Unsur Keterangan (UUK) yang akan dilaksanakan dengan Manajemen Operasi Tujuh Langkah (MOTL) serta disesuaikan dengan tupoksi sat Intelijen yang berdasarkan dengan Perkabik. Analisa tugas pada proses perencanaan penyelidikan diatur dalam pasal 15 ayat (4) Perkabik No. 1 Tahun 2013 tentang penyelidikan intelijen. Dalam pelaksanaan MOTL, tujuh Langkah yang dimaksud dan harus diperhatikan sebagai berikut:

1. Penalaran UUK/TO.

Merupakan perintah atau permintaan yang merupakan persoalan yang diberikan oleh kepala satuan yang harus dijawab atau dipecahkan oleh petugas intelijen. UUK berupa lembaran kerja yang dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan intelijen. UUK memuat data awal dari persoalan serta memuat data, fakta atau bahan keterangan yang diperlukan untuk memperoleh kejelasan dan ketepatan mengenai duduk persoalan yang sebenarnya, agar dicari dan dikumpulkan oleh pelaksana yang diperintahkan sehingga pimpinan memperoleh masukan yang bermanfaat dalam menentukan langkah kebijaksanaan serta pengambilan keputusan berdasarkan tindakan yang telah diperhitungkan.

2. Penyusunan Rengas.

Penyusunan rengas didasari oleh data casing. Rengas merupakan perencanaan taktis dan strategi lapangan unit operasional selama melaksanakan pengumpulan bahan

keterangan dilapangan. Rengas berupa penggambaran secara umum arah operasi penyelidikan, sistem pengamanan dan komunikasi yang akan dilakukan serta pelaksana dan rencana umum tugas yang akan dilaksanakan.

3. Penyusunan Bargas.

Merupakan suatu kegiatan secara administrasi dalam bentuk pembagian tugas yang diemban oleh anggota unit berdasarkan kepada rengas dengan melihat dari kemampuan perorangan dari anggota unit tersebut. Penyusunan bargas dilakukan guna memperjelas atau meringankan tugas yang dilakukan anggota unit serta menciptakan efektifitas dalam melaksanakan tugas, mengetahui dan melihat kemampuan anggota unit, menentukan sasaran dan kegiatan yang akan dilakukan oleh anggota unit operasional.

4. Briefing/persiapan.

Briefing/persiapan, pada tahapan ini para kanit akan melakukan pengecekan guna melihat kesiapan anggota sebelum melaksanakan tugas. Pengecekan yang dilakukan berupa pengecekan kondisi fisik anggota, pengecekan kesiapan mental anggota dan pengecekan sistim pengamanan yang dimiliki oleh anggota.

5. Kegiatan lapangan.

Kegiatan lapangan merupakan pelaksanaan dari penyelidikan, dimana kanit maupun anggota melakukan kegiatan sesuai dengan jadwal kegiatan masing-masing terhadap sasaran yang telah dibagi.

6. Debriefing.

Debriefing merupakan pelaporan setiap anggota unit kepada kanit mengenai tahapan-tahapan pelaksanaan tugas secara

kronologis dan terperinci serta hasil-hasil yang telah dicapai oleh setiap anggota unit. Selain anggota yang melaporkan pencapaian tugas kepada kanit, kanit juga melakukan pengawasan dengan menanyakan kepada setiap anggota mengenai hal-hal penting yang menyangkut data operasional dan baket untuk memperoleh kejelasannya.

7. Pelaporan.

Tahapan terakhir dari MOTL yakni pelaporan. Pelaporan merupakan penuangan hasil pengumpulan baket kedalam bentuk produk. Anggota unit yang telah mendapatkan bahan keterangan akan menuangkannya kedalam produk berupa laporan kegiatan harian dan laporan informasi, kemudian kanit menghimpin laporan-laporan yang telah dibuat oleh anggota dan menyatukannya dalam sebuah laporan penugasan.

Pelaksanaan MOTL yang dilakukan oleh Satintelkam Polres Karanganyar secara SOP telah dilaksanakan dengan baik, namun setelah proses pelaporan perlu dilakukan penataan *soft file* maupun produk intelijen secara baik guna memudahkan pencarian data dikemudian hari. Penataan secara fisik maupun digital computer diperlukan untuk memudahkan personel dalam mengakses data bila diperlukan Kembali. Satintelkam Polres Karanganyar perlu menekankan kepada anggota ataupun urmintu untuk selalu munyusun serta menyimpan data dengan baik dan rapi sehingga setiap baket dan administrasi penyelidikan dapat dikuasai dengan baik oleh Satintelkam Polres Karanganyar.

d. Menyusun Rencana kegiatan Deteksi Dini

Penyusunan rencana penyelidikan diatur dalam pasal 15 ayat (5) Perkabik No.1 tahun 2013 tentang Penyelidikan Intelijen. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan deteksi dini guna pencegahan konflik

antar perguruan pencak silat merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Kanit guna mengendalikan anggota unit dalam pelaksanaan kegiatan deteksi dini agar tercapainya tujuan dari deteksi dini yang dilakukan. Dasar dari perencanaan yang akan dibuat tentunya berdasarkan dari UUK yang diberikan oleh kasat. Kemudian dari UUK dibuatlah perencanaan yang berisi indikasi permasalahan, sasaran baket, sumber baket dan waktu atau tempat penyampaian baket.

Dengan perkembangan zaman yang terjadi, tentu saja Polri menerapkan hal-hal baru dalam pelaksanaannya seperti penggunaan teknologi dan internet. Pengoptimalan rencana deteksi penyelidikan deteksi dini konflik antar perguruan pencak silat dibuatkan dalam bentuk form secara administratif ataupun dimuat dalam tulisan diatas papan yang akan digunakan dalam rapat internal. Setelah dibuat dalam bentuk form, rencana penyelidikan deteksi dini tersebut dapat bagikan kepada personel secara personal maupun melalui media sosial grup *WhatsApp* dengan tujuan setiap anggota Satintelkam dapat memonitor rencana kegiatan yang telah dibuat. Penggunaan teknologi dalam pelaksanaan rencana ini memudahkan dan mempersingkat waktu untuk bergerak lebih cepat.

4.1.2. Pengorganisasian (*Organization*)

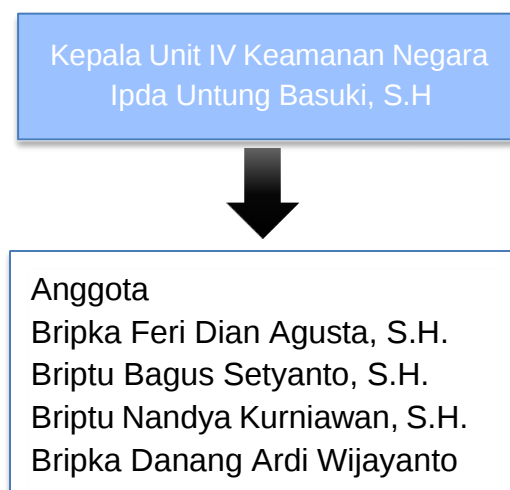
Setelah langkah perencanaan dalam deteksi dini langkah selanjutnya yang dilakukan adalah pengorganisasian. pengorganisasian berpedoman pada Perkap No. 1 Tahun 2019 Tentang Sistem, Manajemen dan Standar Keberhasilan Operasional Polri. Pengorganisasian dalam deteksi dini ditujukan agar pelaksanaan tugas personel Satintelkam terstruktur dan memahami pembagian kerja yang harus dilakukan. Hal ini bertujuan agar tugas dapat terlaksana dengan baik dan mencapai hasil yang diinginkan. Keberhasilan dapat tercapai

dengan pengorganisasian yang baik dan tentunya memiliki seorang pemimpin yang memegang peran penting sebagai orang yang bertanggung jawab atas keberhasilan operasi yang dilakukan. Dengan pengorganisasian tersebut, anggota dapat memahami bidang tugas yang harus dikerjakan dan dapat melaksanakan tugas dengan maksimal.

Satuan Intelkam Polres Karanganyar dalam hal ini telah membagi peran dalam pelaksanaan tugasnya. Kasat Intelkam sebagai pimpinan dari Satuan Intelkam telah menentukan pembagian kerja personelnnya. Berkaitan dengan pelaksanaan deteksi dini konflik perguruan pencak silat, diemban oleh Unit IV Kamneg sehingga konflik perguruan pencak silat menjadi kewenangan dan pertanggung jawaban dari Unit IV. Unit Kamneg dalam melaksanakan tugasnya memiliki struktur organisasi sebagai berikut :

Gambar 4.1

Struktur Organisasi Unit IV Kamneg



Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasat Intelkam Polres Karanganyar Iptu Ali Suryadi, S.H. dalam pelaksanaan pengorganisasian Satuan Intelkam, mengatakan bahwa:

“...Untuk pengorganisasian Sat Intelkam, masing-masing kanit sebelumnya sudah harus bisa menjabarkan perintah kasat ketika ada permasalahan. Sebelum pelaksanaan deteksi munculah UUK sebagai intisari baket yang dibutuhkan. Kemudian kasat memerintahkan kanit untuk melaksanakan kegiatan deteksi dengan MOTL (Manajemen Operasi Tujuh Langkah) berdasarkan dengan UUK yang telah diberikan.”

Unit Kamneg sebagai unit yang bertanggung jawab akan konflik perguruan pencak silat, akan mengumpulkan seluruh bahan keterangan (baket) maupun deteksi dini terkait perguruan pencak silat yang kemudian akan diberikan kepada kasat intelkam lalu dilaporkan kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan untuk selanjutnya dapat diambil langkah kebijakan selanjutnya dalam hal menangani konflik perguruan pencak silat. Kanit membagi tugas kepada anggota unit untuk melaksanakan pulbaket sesuai dengan kemampuan dan kompetensi yang dimiliki oleh anggota. Pembagian tugas yang telah diberikan oleh Kanit tersebut kemudian dilanjutkan oleh anggota dengan cara bertindak *person to person* maupun kisaran suara terkait perguruan pencak silat serta tanggapan yang dilakukan oleh perguruan lain dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh perguruan pencak silat lainnya.

Pengorganisasian yang telah dilaksanakan oleh Unit IV cukup baik. Namun dengan keterbatasan anggota yang dimiliki Unit IV membuat beban kerja yang diterima oleh anggota cukup berat sehingga perlu untuk menambah dan meningkatkan kemampuan anggota dengan memberikan Dikbang/Dikbangspes guna menunjang pelaksanaan tugas yang dimiliki oleh anggota Unit IV. Dengan keterbatasan anggota, pengorganisasian yang baik diharapkan mampu membuat pelaksanaan tugas menjadi lebih optimas dan efisien.

4.1.3. Actuating

Pelaksanaan deteksi dini perguruan pencak silat yang dilakukan oleh Unit IV kamneg adalah dengan penyelidikan intelijen maupun pembinaan jaringan intelijen sebagai upaya pelaksanaan deteksi dini guna mendapatkan informasi dan juga memberikan peringatan dini. Kegiatan deteksi dini tersebut dilaksanakan dengan mengaplikasikan rencana kegiatan yang telah tersusun dalam tahapan perencanaan. Berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) deteksi dini Satuan Intelkam Polres karanganyar No. 006/SOP/II/2020/INTELKAM sebagai berikut:

Tabel 4.1
SOP Pelaksanaan Deteksi Dini

No	Kegiatan	PELAKSANA				MUTU BAKU		
		Angt	Kanit	Kasat	Kapolres	Kap	Waktu	Output
1	Unit mengajukan Laporan Informasi awal tentang situasi di bidang Keamanan Negara	Mulai				ATK	3 jam	Laporan Informasi
2	Kasat Intelkam menentukan UUK, dan Unit membuat RENGAS, BARGAS		Ya			Target lidik/pam/gal	48 jam	UUK, RENGAS BARGAS
3	Memberikan arahan / briefing kepada anggota unit, mengenai target penyelidikan / pengamanan / penggalangan khususnya di bidang Keamanan Negara		Pencatatan awal			Unit Kam Neg	2 jam	Inti arahan
4	Melaksanakan penyelidikan / pengamanan / penggalangan di lapangan yang di tuangkan dalam produk Laporan Informasi		Laks Tupoksi Intel			Unit Kam Neg	144 jam	Bakot LAPGAS Laporan Informasi
5	Menyusun Laporan Penugasan sebagai pelaporan hasil pelaksanaan tugas		Ya			ATK, Unit Kam Neg	10 menit 4 jam	LAPGAS
6	Menyajikan kepada Pimpinan/User, sebagai bahan pengambilan keputusan			YA		Unit Kam Neg		SELESAI

Sumber : Urmintu Satintelkam Polres Karanganyar

Berdasarkan gambar diatas, pelaksanaan deteksi dini nantinya berupa pengumpulan, pengolahan dan penyajian bahan keterangan. Anggota akan melaksanakan pengumpulan data dengan mengumpulkan bahan keterangan yang dilakukan dengan taktik dan Teknik intelijen. Taktik dan Teknik intelijen dibagi menjadi dua yakni, penyelidikan secara terbuka dan tertutup.

Upaya dan Langkah yang dilakukan memiliki penafsiran serta Analisa terkait suatu kegiatan agar pada saat pelaksanaan suatu kegiatan intelijen, kamtibmas tetap terus bisa terjaga. Pelaksanaan deteksi dini yang dilakukan oleh intelijen berupa penggalangan, pulbaket dan koordinasi terhadap ketua cabang, ketua ranting, sub ranting dan IPSI (Ikatan Pencak Silat Indonesia), guna melaksanakan koordinasi terkait setiap melaksanakan kegiatan perguruan pencak silat agar situasi dan kondisi kabupaten Karanganyar tetap terjaga dan kondusif.

Pelaksanaan deteksi dini yang dilakukan oleh Satintelkam dalam mengumpulkan bahan-bahan keterangan hingga pengolahan data kemudian disajikan kepada pimpinan telah sesuai dengan prosedur pelaksanaan sebagaimana yang diatur dalam Perkabik No.1 tahun 2013. Sesuai dengan proses pengumpulan bahan keterangan sebagaimana diatur dalam pasal 16 ayat 1 Peraturan Kepala Badan Intelijen Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia No.1 Tahun 2013 tentang Penyelidikan Intelijen Negara kepolisian Indonesia. Kegiatan pengumpulan bahan keterangan yang dilakukan oleh Satintelkam Polres Karanganyar melalui taktik dan teknik intelijen guna mendapatkan bahan keterangan dari sumber utama (primer) sehingga bahan keterangan yang didapatkan merupakan informasi terpercaya dan dapat disajikan kepada pimpinan. Selanjutnya dalam pasal 16 ayat 2 dan 3 Perkabik No.1 tentang Penyelidikan Intelijen, penyelidikan dapat dilakukan dengan Penyamaran (cover name, cover job, cover story dan lain-lain) dan Penyesatan (desepsi kata, desepsi gerak).

Sesuai dengan pasal 16 ayat 2 Perkabik No.1 tentang Penyelidikan Intelijen Satintelkam Polres Karanganyar dalam pelaksanaan deteksi dini telah menunjukkan hal tersebut di lapangan, personel menyamar dengan menggunakan pakaian sipil disesuaikan dengan wilayah target operasi. Penggunaan nama samaran, pekerjaan samaran dan cerita samaran telah dipersiapkan sebelum mendekati target operasi sehingga target operasi tidak mengenali anggota yang sedang melakukan deteksi dini di lapangan.

Selain menggunakan taktik yang tepat, penggunaan teknik penyelidikan yang tepat juga sangat penting guna mendapatkan informasi yang berkualitas. Penggunaan teknik yang tepat dilaksanakan berdasarkan bentuk-bentuk teknik penyelidikan sebagaimana diatur dalam pasal 16 ayat 3 Perkabik No.1 Tahun 2013 Tentang penyelidikan. Berdasarkan pasal 16 ayat 3 Perkabik No.1 Tahun 2013 tentang penyelidikan, teknik penyelidikan dibagi menjadi 2 yaitu penyelidikan terbuka dan penyelidikan tertutup. Dalam penyelidikan Konflik perguruan pencak silat, Satintelkam menggunakan teknik penyelidikan tertutup. Penyelidikan tertutup terdiri dari *eliciting* (wawancara terselubung), pengamatan, penggambaran, penjejak, pembuntutan, penyusupan, penyadapan dan penyurupan. Berdasarkan hasil wawancara dengan KBO Intelkam Polres Karanganyar, Iptu Budi Santoso, S.H. menyatakan bahwa:

“Untuk pelaksanaan penyelidikan konflik perguruan pencak silat, Satintelkam menggunakan teknik penyelidikan tertutup dalam mengumpulkan bahan keterangan di lapangan. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar target yang sedang kita lakukan penggalangan tidak mengetahui maksud dan tujuan dari kita. Selain untuk menjaga kerahasiaan tugas, hal ini juga dilakukan demi keselamatan anggota yang bertugas.”

Observasi yang dilakukan oleh penulis menemukan bahwa Satintelkam dalam melaksanakan penyelidikan tertutup terkait konflik perguruan pencak silat hanya menggunakan teknik *elicyting* (wawancara terselubung), pengamatan, penggambaran, penjejukan, pembuntutan dan penyusupan. Penyadapan dan penyurupan tidak digunakan oleh Satintelkam Polres Karanganyar dikarenakan Satintelkam tidak memiliki peralatan khusus yang mendukung teknik tersebut.

Setelah penyelidikan berhasil dilaksanakan, anggota Satintelkam melakukan pengumpulan bahan keterangan yang nantinya akan diolah menjadi produk intelijen kemudian disajikan kepada pimpinan tertinggi yakni Kapolres Karanganyar. Produk Intelijen yang dibuat berupa laporan Intelijen Khusus, perkiraan singkat Intelijen dan diakhiri dengan laporan penugasan. Namun, dalam beberapa situasi dan kondisi tertentu yang sangat mendesak maka pelaporan akan dilakukan melalui sarana media sosial seperti WhatsApp. Penggunaan aplikasi media sosial sebagai sarana pelaporan secara langsung didasari atas kecepatan penerimaan informasi secara langsung kepada pimpinan.

Pelaksanaan deteksi dini Satintelkam Polres Karanganyar diharapkan mampu memberikan peringatan dini bagi Polres untuk mengantisipasi setiap kegiatan dan pergerakan serta mencegah terjadinya konflik perguruan pencak silat. Deteksi dini dengan mengalisis permasalahan dan gejala-gejala juga diharapkan mampu menemukan solusi dari permasalahan perguruan pencak silat ini.

4.1.4. *Controlling*

Keberlangsungan dan kelancaran pelaksanaan deteksi dini tidak lepas dengan adanya pengawasan dan pengendalian agar pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Kegiatan pengendalian pelaksanaan deteksi dini dilakukan sebagaimana dengan Pasal 36 ayat (1) huruf c Perkabik No.1 Tahun 2013 tentang Penyelidikan Intelijen. Kasat Intelkam sebagai penanggung

jawab dari Satuan Intelkam akan mengawasi pelaksanaan dari setiap unit yang dimilikinya sesuai dengan job description dari masing-masing unit. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh Kasat Intelkam dengan mengontrol dan terus memberi arahan kepada para Kanit selaku penanggung jawab dari masing-masing unit.

Mengumpulkan kanit untuk melaksanakan evaluasi sebagai bentuk pengawasan serta mengontrol melalui pelaporan dan produk intelijen adalah langkah yang dilakukan oleh Kasat Intelkam guna melakukan pengawasan dan pengendalian anggotanya agar seluruh kegiatan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah direncanakan. Hal tersebut merupakan pengawasan dan pengontrolan kepada anggota yang melakukan tugas di lapangan. Namun berbeda dengan pengawasan dan kontrol yang dilakukan Satuan Intelkam dalam deteksi dini terhadap perguruan pencak silat. Pengawasan dan control yang dilakukan kepada perguruan pencak silat melalui deteksi dini yakni dengan melakukan koordinasi, komunikasi, penggalangan dan pengendalian terhadap Perguruan Pencak Silat yang akan melaksanakan kegiatan.

Kondisi yang diharapkan dengan adanya pengendalian dan pengawasan deteksi dini adalah anggota mampu melaksanakan pengolahan data dan pembuatan produk intelijen dengan baik. Anggota juga diharapkan membuat penataan soft file dan rekapitulasi produk intelijen untuk memudahkan pengawasan serta tidak terjadi manipulasi data. Selain itu, pengendalian lapangan bertujuan agar pelaksanaan tugas dan kegiatan masyarakat dapat berjalan dengan lancar dan terkendali.

4.2. Kondisi yang Diharapkan Terkait Pencegahan Konflik Perguruan Pencak Silat oleh Satuan Intelkam Polres Karanganyar

Konflik antar perguruan pencak silat di wilayah Kabupaten Karanganyar bukanlah fenomena baru bagi masyarakat Karanganyar. Berbagai cara telah dilakukan oleh Polres Karanganyar guna mencegah dan menyelesaikan konflik yang terus bermunculan di wilayah hukum Polres Karanganyar. Tindakan secara preemtif, preventif maupun represif telah dilakukan oleh Polres Karanganyar guna menangani permasalahan tersebut. Mulai dari himbauan dan sambang kepada masyarakat maupun organisasi pencak silat hingga penegakan hukum telah dilakukan untuk menyelesaikan masalah. Polres Karanganyar juga melakukan *Restorative justice* dalam menyelesaikan beberapa permasalahan guna terciptanya rasa persaudaraan antar perguruan pencak silat namun masih muncul gesekan antar perguruan pencak silat tersebut.

Polres Karanganyar mengundang dan mempertemukan perguruan pencak silat dalam beberapa forum untuk menentukan solusi agar konflik dapat segera dituntaskan dan mampu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak. Namun pelaksanaan mediasi atau penuntasan perkara kurang melibatkan para tokoh masyarakat, tokoh adat dan FKPM/Pokdar Kamtibmas serta para pengurus perguruan silat yang paling sering berkonflik di Karanganyar, sehingga proses mediasi kurang komunikatif dan personel kurang mampu memberikan *win-win solution* kepada kedua belah pihak dan berpotensi menimbulkan situasi kontijensi bahkan bentrok antar warga.

Tentunya konflik antar perguruan pencak silat di Kabupaten Karanganyar ini tidak lepas dari proses-proses yang berlangsung dalam kehidupan manusia, dengan begitu penulis menemukan beberapa hal dasar dari konflik yang terjadi berdasarkan temuan yang ditemukan di lapangan oleh Satintelkam Polres Karanganyar, diantaranya yaitu:

a. Penyebab Konflik

Konflik yang terjadi antara perguruan pencak silat berdasarkan observasi dan studi dokumen yang telah dilaksanakan oleh penulis, bahwa konflik antar perguruan pencak silat di Kabupaten Karanganyar terjadi karena beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Konflik antar perguruan pencak silat PSHT parlu 16 dan 17, di sebabkan karena adanya perebutan ketua cabang pusat PSHT hingga memecah belah PSHT menjadi dua bagian yakni PSHT parluh 16 dan 17. Perpecahan dicabang pusat berdampak hingga ke seluruh wilayah Indonesia terutama pulau jawa.
- 2) Perbedaan sosial budaya antara masing-masing perguruan pencak silat terutama di wilayah Kabupaten Karanganyar terdapat 12 perguruan pencak silat yang berbeda.
- 3) Pembentukan fisik dan mental yang tidak seimbang, dimana pelatihan hanya membentuk fisik yang menciptakan karakter tangguh dan keras tanpa diimbangi dengan pembentukan mental dan pengendalian diri.
- 4) Perilaku agresif yang dilakukan oleh antar perguruan yang menyebabkan saling serang-menyerang antar perguruan.

b. Sumber Konflik

Sumber konflik yang terjadi antar perguruan pencak silat disebabkan oleh adanya komunitas-komunitas di dalam organisasi pencak silat yang memiliki tujuan yang berbeda, sifat ego yang tinggi dan sulit di kontrol oleh organisasi. Komunitas-komunitas ini selalu ingin menunjukkan taringnya dengan perilaku agresif yang dilakukan, contohnya seperti pawai dengan menggunakan bendera komunitas dan melakukan perilaku agrsif dengan anggota perguruan

lain apabila berpapasan pada saat pawai, sehingga menimbulkan konflik antar perguruan pencak silat.

c. Proses-proses Konflik

proses konflik berawal dari pertemuan antar komunitas dari perguruan pencak silat berbeda yang ingin menunjukkan taringnya. Salah satu anggota dari komunitas menyerang anggota dari perguruan pencak silat lain, karena tidak terima anggota perguruan ada yang diserang, maka terjadilah aksi saling membalas hingga terjadi pertikaian yang bahkan merugikan masyarakat sekitar yang terjadi konflik. Untuk menyelesaikan masalah, mereka akan membuat kesepakatan untuk bertemu di satu titik atau dalam Bahasa mereka *codan*. Setelah bertemu mereka akan saling menyerang, hal tersebut akan mengganggu kamtibmas dan berpotensi timbulnya korban jiwa. Anggota dari komunitas rata-rata berusia remaja yang labil dalam mengendalikan emosi dan sedang mencari jati diri. Contoh proses konflik yang terjadi antara dua perguruan IKS PI dan Pagar Nusa NU. Konflik terjadi pada saat penulis sedang melaksanakan penelitian di Polres Karanganyar. Konflik bermula dari anggota pagar nusa yang melakukan pawai setelah pulang dari kejuaraan antar pagar nusa tidak sengaja bertemu dengan salah satu anggota IKS PI, kemudian salah satu anggota menyerang hingga anggota IKS PI mengalami luka. Karena tidak terima, korban mengajani rekan seperguruannya dengan membalas dendam dan menyerang daerah tempat basis perguruan pagar nusa NU hingga mengakibatkan korban diantara kedua belah pihak dan rusaknya rumah warga akibat aksi tersebut.

Analisa konflik diatas merupakan Langkah awal dalam pencegahan konflik antar perguruan pencak silat. Analisa dilakukan guna mengetahui karakteristik sasaran serta memetakan permasalahan yang terjadi. Konflik biasanya dipahami sebagai benturan antara gagasan, sikap serta Tindakan dan tujuan yang

berbeda sehingga perlunya melakukan analisa dengan baik dan benar. Analisa yang tepat diharapkan berpengaruh pada bahan keterangan dan laporan informasi yang baik dikarenakan, hasil analisa yang baik menentukan pelaksanaan deteksi dini dan Langkah kebijakan berikutnya.

4.2.1 Deteksi Dini Sebagai Pencegahan Konflik yang Dilakukan Satintelkam Polres Karanganyar

Polres Karanganyar melalui satintelkam Polres Karanganyar, telah melakukan berbagai cara dalam melaksanakan tugasnya guna menangani konflik perguruan pencak silat. Salah satu upaya pencegahan yang terus dilakukan oleh Satintelkam Polres Karanganyar adalah dengan melakukan deteksi dini guna mengetahui lebih awal dan memperkirakan terjadinya suatu konflik. Deteksi dini dilakukan sebagai peringatan dini yang dilakukan oleh Satintelkam Polres Karanganyar agar dapat memperkirakan situasi dan kondisi guna memudahkan pimpinan untuk mengambil kebijakan.

Satintelkam Polres Karanganyar melakukan pencegahan konflik perguruan pencak silat dengan melalui deteksi dini, Satintelkam Polres Karanganyar secara struktural berkoordinasi dengan masing-masing ketua cabang, ketua ranting, ketua rayon dan kelompok keamanan dari masing-masing perguruan pencak silat melalui silaturahmi dan juga berhubungan melalui alat komunikasi seperti *Handphone* Selanjutnya Satintelkam Polres Karanganyar melakukan pendekatan persuasive dengan masing-masing kelompok atau komunitas.

Setiap perguruan pencak silat memiliki komunitas. Komunitas yang terbentuk di dalam perguruan pencak silat tidak sesuai dengan ADRT perguruan yang telah berlaku. Komunitas sering terlibat dalam setiap kegiatan di lapangan dan menjadi penyebab konflik atau gesekan antar perguruan adalah komunitas-komunitas perguruan pencak silat.

Menanggapi hal tersebut, Satintelkam Polres Karanganyar melakukan deteksi dini dengan cara menghubungi admin-admin yang berada di setiap komunitas sebagai upaya pencegahan konflik dan deteksi dini terhadap komunitas perguruan pencak silat. Satintelkam Polres Karanganyar mengajak admin-admin komunitas perguruan pencak silat untuk melakukan koordinasi serta melakukan penggalangan terhadap komunitas-komunitas perguruan pencak silat guna meminimalisir kegiatan-kegiatan yang menyebabkan gesekan atau konflik antar perguruan pencak silat.

Langkah-langkah Satintelkam Polres Karanganyar dalam meredam atau menciptakan situasi Kamtibmas di wilayah Kabupaten Karanganyar terkait dengan adanya gesekan antar Ormas Perguruan Silat yang Notabene anggota berasal dari kalangan Remaja yang tingkat emosional nya masih tinggi sebagai berikut :

- a. Melakukan upaya penggalangan berupa dorongan terhadap IPSI Kabupaten Karanganyar selaku Wadah Ormas Perguruan Silat yang ada di wilayah Kabupaten Karanganyar untuk dapat mengumpulkan masing-masing ketua Ormas Perguruan Silat untuk melakukan Konsolidasi dengan tujuan Penandatanganan Deklarasi Damai.
- b. Koordinasi dengan Kesbangpol Kab. Karanganyar selaku Instansi yang membidangi di bagian Ormas untuk mendukung kegiatan Konsolidasi Ormas Perguruan Silat Kabupaten Karanganyar dalam rangka penandatanganan Deklarasi damai.
- c. Kolaborasi dengan Awak Media Kabupaten Karanganyar guna meredam isu-isu / hoax yang beredar terkait dengan perkembangan Ormas Perguruan Silat di wilayah Kabupaten Karanganyar serta mendorong awak media untuk mengupload kegiatan Deklarasi Damai Ormas Perguruan silat

Selain dengan melakukan koordinasi dan penggalangan, Satintelkam Polres Karanganyar juga melakukan deteksi dini dengan masuk menjadi anggota perguruan pencak silat. Anggota yang diberi tanggung jawab tugas tersebut mengikuti pelatihan dari dasar hingga dilantik menjadi warga perguruan pencak silat. Dengan adanya anggota Satintelkam Polres Karanganyar yang menjadi anggota perguruan pencak silat, hal tersebut dapat memudahkan Satintelkam untuk memantau pergerakan serta melakukan koordinasi dengan perguruan pencak silat tersebut.

4.3 Langkah-langkah Pemecahan Masalah

4.3.1. Pemecahan Masalah Kinerja Satintelkam Polres Karanganyar dalam melaksanakan Deteksi Dini Pencegahan Konflik Perguruan Pencak silat

Pelaksanaan deteksi dini oleh Satintelkam Polres Karanganyar dalam pelaksanaannya terdapat beberapa proses maupun tahapan didalamnya. Pelaksanaan deteksi dini yang efektif dan efisien dilakukan dengan manajerial yang baik dan didasarkan dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Pelaksanaan deteksi dini Satintelkam Polres Karanganyar dinilai perlu melakukan pengoptimalan pada kinerjanya guna mendapatkan hasil yang maksimal. Hal ini dilakukan untuk mencapai tujuan jangka pendek maupun jangka Panjang suatu organisasi. Dalam meningkatkan kinerja dalam Satintelkam Polres Karanganyar, dapat dilakukan dengan meningkatkan Ketrampilan (*skill*), pengetahuan/*kognitif* (*knowledge*) serta membuat selektif prioritas (*selective priority*) Berikut Langkah pemecahan masalah dari penulis guna meningkatkan kinerja Satintelkam Polres karanganyar dalam pencegahan konflik perguruan pencak silat melalui deteksi dini Satintelkam.

a. Kompetensi Ketrampilan (*skill*)

Pelaksanaan deteksi dini yang berpedoman pada Perkabaintelkam Polri No. 1 Tahun 2013 tentang Penyelidikan Intelijen dalam pencegahan konflik perguruan pencak silat. Ketrampilan personel yang perlu ditingkatkan dalam pelaksanaan deteksi dini berupa perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasan. Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis memberikan pemecahan masalah dalam pengoptimalan deteksi dini terhadap konflik perguruan pencak silat meliputi:

1. Perencanaan deteksi dini

Sebelum melaksanakan deteksi dini, persiapan dan perencanaan yang matang menjadi kunci dalam pelaksanaan deteksi dini nantinya. Berdasarkan hasil penelitian, hal yang dapat dilakukan guna meningkatkan perencanaan yaitu:

- a) Membuat UUK sesuai dengan Perkabaintelkam No.5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan produk Intelijen.
- b) Membuat analisis secara jelas dan lengkap meliputi sasaran, lokasi, benda, dan kegiatan guna mempermudah personel dalam mencari bahan keterangan.
- c) Membuat target kelengkapan administrasi perencanaan kepada personel sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

2. Pengorganisasian

Pengorganisasian yang baik akan menentukan jalannya pelaksanaan deteksi dini. Pengoptimalan pengorganisasian yang dapat dilakukan oleh Satintelkam Polres Karanganyar yaitu:

- a) Menetapkan *job description* dan sasaran tugas masing-masing unit secara tepat untuk membatasi ruang lingkup sasaran tugas guna mendapatkan hasil yang maksimal.
- b) Meminta *back up* personi dalam pelaksanaan kegiatan.

3. Pelaksanaan deteksi dini

Pelaksanaan yang baik tentunya akan menghasilkan bahan keterangan serta produk intelijen yang baik. Sehingga dalam pelaksanaannya perlu terus ditingkatkan agar selalu mendapatkan hasil yang maksimal. Pengoptimalan yang dapat dilakukan guna meningkatkan pelaksanaan yaitu:

- a) Selain berpedoman pada Uuk yang telah diberikan oleh kasat, sebelum melakukan kegiatan perlu adanya AAP dari kasat guna memperjelas pelaksanaan tugas personel.
- b) Pembuatan produk secara rinci sesuai dengan hasil pelaksanaan deteksi dini.
- c) Mengikut sertakan seluruh elemen masyarakat dan pihak terkait sebagai jaringan intelijen guna mendukung pelaksanaan tugas detek dini.

4. Pengendalian dan pengawasan

Guna menjaga ketertiban dan keamanan dalam pelaksanaan deteksi dini maka perlu dilakukan pengawasan dalam pelaksanaan tugas. Pengoptimalan yang dapat dilakukan yaitu:

- a) Pengecekan secara rutin terkait produk intelijen.
- b) Membuat rekapan dan data base terkait hasil pelaksanaan deteksi dini. Agar mempermudah menyimpan arsip dan pengambilan data bila ingin digunakan Kembali.

- c) Menyusun dan menata lemari produk dengan baik guna memudahkan dalam menyimpan hard copy dan pencarian produk.

Secara keseluruhan yang telah dilakukan oleh Satintelkam Polres Karanganyar telah baik, namun masih ada beberapa hal yang harus ditingkatkan guna mendapatkan hasil yang maksimal dan meningkatkan profesionalitas Satintelkam Polres Karanganyar. Terutama dalam penyimpanan dan pengarsipan produk yang dinilai sangat kurang. Pengarsipan dapat membantu pimpinan dalam menganalisis pelaksanaan dan permasalahan yang telah terjadi guna melihat perkembangan serta pengambilan kebijakan kedepannya.

b. *pengetahuan/kognitif (knowledge)*

Selain itu dalam peningkatan pengetahuan yang dapat dilakukan oleh Satintelkam Polres Karanganyar adalah kompetensi pengetahuan. Setiap personel memiliki tingkat pemahaman dan pengetahuan yang berbeda dalam menghadapi persoalan. Berdasarkan data yang diterima oleh peneliti bahwa Pendidikan kejuruan yang diterima oleh personel Satintelkam Karanganyar dilakukan secara bergilir. Namun, apabila menunggu tentu akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Karena dalam pelaksanaan dikbangspes atau pelatihan fungsi intelijen memiliki kuota yang terbatas. Jika seperti itu maka pengetahuan yang dimiliki oleh anggota sangatlah kurang dan perlu untuk diperbaharui.

Satintelkam Polres Karanganyar dalam hal ini dapat mengoptimalkan kompetensi pengetahuan personel dengan melakukan pelatihan intelijen mandiri dengan belajar dari anggota yang lebih senior, atau yang sudah mengikuti dikbangspes ataupun pelatihan intelijen lainnya.

Pembelajaran dapat dilakukan dengan melakukan *Forum Group Discussion* (FGD) untuk melakukan sesi tanya jawab dan diskusi terkait pengalaman dan ilmu yang pernah didapatkan. Personel yang lebih senior dapat mengajak personel lainnya untuk mempraktekkan langsung dilapangan kemudian melakukan evaluasi terkait kegiatan tersebut. Hal ini dapat dilakukan secara berkala guna meningkatkan kompetensi pengetahuan personel hingga pengetahuan intelijen yang dimiliki terus berkembang.

c. Selektif prioritas (*selective Priority*)

Permasalahan yang ditangani oleh Satintelkam Polres Karanganyar sangatlah beragam, karena Satintelkam menangani semua bidang permasalahan mulai dari ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan. Dari kelima bidang tersebut, masing-masing ditangani oleh unit yang telah dibagi, setiap unit akan fokus terhadap bidang yang ditangani. Unit IV merupakan unit yang fokus terhadap bidang keamanan yang menangani langsung permasalahan konflik perguruan pencak silat.

Terkait hal tersebut, guna menangani konflik perguruan pencak silat Satintelkam Polres Karanganyar dapat menerapkan sistem selektif prioritas. Dimana Satintelkam dapat memfokuskan pelaksanaan deteksi dini dan kegiatan terhadap permasalahan yang menjadi atensi pimpinan. Seperti halnya yang sedang berkembang saat ini adalah permasalahan konflik perguruan pencak silat. Satintelkam Polres Karanganyar dapat melakukan langkah selektif prioritas terhadap konflik perguruan pencak silat. Dengan melakukan selektif prioritas, Satintelkam dapat mengarahkan unit lainnya untuk ikut membantu melaksanakan penyelidikan dan deteksi dini terhadap konflik

perguruan pencak silat sehingga pelaksanaan penyelidikan dan deteksi dini dapat dilakukan lebih maksimal. Dengan dilakukannya selektif prioritas, diharapkan mampu mengurangi bahkan menyelesaikan permasalahan tersebut dan menjadi solusi dalam pengoptimalan pelaksanaan deteksi dini perguruan pencak silat di wilayah hukum Polres Karanganyar.

4.3.2 Pemecahan Masalah Pencegahan Konflik Perguruan Pencak Silat oleh Satuan Intelkam Polres Karanganyar.

Pelaksanaan pencegahan konflik yang dilakukan guna mencegah terjadinya konflik dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan system peringatan dini sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial telah dilakukan oleh Polres Karanganyar sebagaimana mestinya. Penanganan konflik ditujukan untuk menciptakan serta memelihara kondisi kehidupan masyarakat yang aman, tentram damai dan sejahtera.

Polres karanganyar melakukan upaya preemtif dengan melakukan pendekatan dengan tokoh-tokoh perguruan guna menjalin komunikasi dan juga koordinasi kepada perguruan pencak silat. Polres Karanganyar juga telah membuat pertemuan antar seluruh tokoh perguruan pencak silat yang ada di wilayah Kabupaten Karanganyar untuk melakukan mediasi dan perjanjian antar seluruh tokoh perguruan dengan tujuan menjaga kondusifitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Berbagai upaya tersebut telah dilakukan Satintelkam Polres Karanganyar namun gesekan antar perguruan pencak silat masih saja terjadi. Maka dari itu, peneliti memberikan pemecahan masalah terkait konflik perguruan pencak silat sebagai berikut:

- a. Mempertemukan tokoh perguruan dengan komunitas-komunitas yang berasal dari perguruan tersebut dan membuat perjanjian. Apabila komunitas dari perguruan tersebut terlibat konflik, maka komunitas yang terlibat beserta tokoh perguruan tersebut diberikan sanksi sosial dengan melakukan kerja bakti atau melakukan pengabdian kepada masyarakat. Dengan begitu, tokoh perguruan akan lebih aktif dalam memperingatkan ataupun menekan komunitas yang ada di dalam perguruanannya untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat menimbulkan konflik.
- b. membuat kegiatan sosial terhadap komunitas-komunitas guna mengalihkan kegiatan komunitas menjadi lebih positif.
- c. memperkuat dan memperkuat patrol intelijen pada saat kegiatan-kegiatan perguruan pencak silat seperti, adanya kegiatan kejuaraan pencak silat, ibadah Bersama, pengesahan warga pencak silat ataupun pada saat pelatihan. Untuk patrol intelijen pada latihan perguruan di prioritaskan pada jam 12 keatas karena Latihan dilakukan pada saat malam hari hingga subuh.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan peneliti dan pembahasan yang dijelaskan pada bab sebelumnya mengenai kinerja dan pelaksanaan pencegahan konflik perguruan pencak silat di wilayah hukum Polres Karanganyar, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut :

a. Kinerja Satintelkam Polres Karanganyar dalam Melaksanakan Deteksi Dini Konflik Perguruan pencak Silat

Satuan Intelkam Polres Karanganyar dalam pengorganisasian pembagian tugas sudah sesuai dengan bidangnya. Deteksi dini Satuan Intelkam Polres Karanganyar dalam menangani konflik antar organisasi perguruan pencak silat dilaksanakan oleh Unit IV. Pengorganisasian yang telah dilaksanakan oleh Unit IV cukup baik. Namun, adanya keterbatasan anggota membuat beban kerja yang diterima oleh anggota cukup berat sehingga pelaksanaan deteksi dini yang dilakukan kurang maksimal. Satintelkam melaksanakan penyelidikan tertutup terkait konflik perguruan pencak silat dalam pelaksanaan deteksi dini. Tugas yang dilakukan Satintelkam Polres Karanganyar sebagian besar sudah sesuai dengan Pasal 36 ayat (1) Perkabik No.1 Tahun 2013 tentang Penyelidikan Intelijen. Namun, pembuatan kertas administrasi dan beberapa tindakan intelijen belum terlaksana dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, upaya pemecahan masalah yang dilakukan adalah peran aktif Kasat Intelkam dengan mengumpulkan kanit untuk melaksanakan evaluasi sebagai bentuk pengawasan serta mengontrol setiap pelaksanaan tugas di lapangan maupun dalam pelaporan produk intelijen.

b. Pencegahan konflik Perguruan Pencak Silat Satintelkam Polres Karanganyar

Upaya Satintelkam dalam menyelesaikan konflik perguruan pencak silat menggunakan Tindakan preemtif dan represif. Polres karanganyar melakukan upaya preemtif dengan melakukan pendekatan dengan tokoh-tokoh perguruan guna menjalin komunikasi dan juga koordinasi kepada perguruan pencak silat. Namun, pelaksanaan mediasi tersebut belum bisa memberikan dampak penurunan konflik antar perguruan pencak silat. Upaya represif yang dilakukan oleh Satintelkam melalui Satreskrim dengan penegakkan hukum sebagai bentuk ketegasan dari Polri, akan tetapi upaya tersebut belum berhasil mengurangi konflik antar perguruan pencak silat yang terjadi di Wilayah Hukum Polres Karanganyar. Upaya penegakkan hukum yang dinilai belum berhasil dapat dilihat dari data LP yang diterima oleh Satreskrim yang terus meningkat setiap tahun.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, dapat dilihat bahwa masih belum optimalnya pelaksanaan deteksi dini dan pencegahan konflik antar perguruan pencak silat di Wilayah hukum Polres Karanganyar. Apabila hal tersebut tidak segera di tindak lanjuti akan berdampak pada institusi Polri maupun masyarakat. Menyikapi hal tersebut, Adapun saran dari penulis sebagai berikut :

a. Kinerja Satintelkam Polres Karanganyar dalam Melaksanakan Deteksi Dini Konflik Perguruan Pencak Silat

Kinerja Satintelkam Polres Karanganyar dalam pelaksanaannya masih perlu dilakukan pengoptimalan guna mendapatkan hasil yang lebih baik, dalam hal ini pelaksanaan deteksi dini perlu memperhatikan Kembali pelaksanaannya dengan mempedomani Peraturan Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri No. 1 Tahun 2013 Tentang

Penyelidikan Intelijen serta Peraturan Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri No.3 Tahun 2013 Tentang penggalangan Intelijen Polri. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti memberikan saran guna meningkatkan kinerja Satintelkam kedepannya Sebagai berikut:

1. Meningkatkan SDM anggota Intelijen serta membangun moral dan semangat anggota dengan memberikan reward dan apresiasi bagi anggota. Hal tersebut dapat menambah moral dan membantu beban kerja anggota menjadi ringan dan maksimal dalam pelaksanaan tugasnya.
 2. Meningkatkan kemampuan personel intelijen dengan membuat *Forum Group Discution* untuk berbagi pengalaman serta membuat selektif prioritas dalam pelaksanaan tugas guna mengatasi anggota yang terbatas dan menangani permasalahan yang menjadi atensi pimpinan.
 3. Membuat administrasi intelijen mulai dari perencanaan kegiatan hingga tahap pengakhiran secara lengkap dan dapat di pertanggungjawabkan.
 4. Membuat dan Menyusun arsip pemberkasan secara sistematis dengan klasifikasi produk yang jelas guna mempermudah pencarian data serta membuat data base sebagai data cadangan apa bila hard copy hilang guna mempermudah penggunaan maupun penyampaian data kepada pimpinan mengingat perkembangan teknologi jaman sekarang.
- b. Pencegahan konflik Perguruan Pencak Silat Satintelkam Polres Karanganyar

Berbagai upaya dalam melakukan pencegahan konflik perguruan pencak silat sudah dilaksanakan oleh Satintelkam Polres Karanganyar, menyikapi hal tersebut penulis memberikan saran guna mencegah konflik perguruan pencak silat yaitu:

1. Meminimalisir faktor kelemahan dan ancaman yang berada didalam internal maupun eksternal Satuan Intelijen. Hal tersebut dapat dilaksanakan dengan membangun dan menjalin hubungan dengan satuan luar wilayah Kabupaten Karanganyar serta selalu berkomunikasi ataupun berkoordinasi terkait hal-hal yang mungkin terjadi maupun menonjol.
2. Melakukan pendekatan lebih dalam kepada perguruan pencak silat dengan mengadakan pembinaan kepada tiap-tiap perguruan pencak silat. Pembinaan dilakukan agar para anggota perguruan pencak silat tidak hanya memiliki seni bela diri, tetapi juga memiliki pembentukan mental serta akhlak yang positif untuk disalurkan kepada masyarakat.
3. Memperkat dan memperkuat patroli serta pengamanan intelijen pada saat jam latihan, kegiatan dan juga pengesahan warga pencak silat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Azwar, Saifuddin. 2014. *Metode Penelitian*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- Gomes, Faustino Cardoso, Dr. 2003. *MSDM*. Yogyakarta: Andi
- Hasibuan, Malayu S.p. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia (Edisi revisi cetakan ke-13)*. Jakarta:PT Bumi Aksara
- Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri. 2019. *Fungsu Teknis Intelkam*. Jakarta:Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri
- Lexy J. Moleong. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Martoyono, Susilo. 2000. *Manajemen Sumberdaya Manusia*. Yogyakarta: PT BPFE-Yogyakarta.
- Marina Liebmann.2007. *Restorative justice : How It Works*. London: Jessica Kingsley Publisher
- Patton, Michael Quinn. 2015.*Qualitative Research and Evaluation Method Fourth Edition*. Los Angeles: Sage Productions
- Saronto, Wahyu Y dan Jasir Karwita. 2001. *Intelijen: Teori, Aplikasi dan Modernisasi*. Jakarta:PT Ekalaya Saputra.
- Sudarmanto. 2009. *Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sugiono. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta
- Suparlan, Parsudi, 2005. *Suku Bangsa dan Hubungan Antar-Suku Bangsa*, cet. 2, Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian.
- Trisno Yuwono. Pius Abdullah. 1994. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya. Arloka
- Yusuf, A. M. (2014). *Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta : Prenadamedia Group.

PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Kepala Badan Intelijen Keamanan No 01 Tahun 2013 tentang Penyelidikan Intelijen

Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.2002. Jakarta: Mabes Polri

JURNAL

Bachri, B.S. 2010. *Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif. Teknologi Pendidikan*, 10, 46-62.

Haris, A. (2019). *Mengenal Gerakan Sosial dalam Perspektif Ilmu Sosial*. HASANUDDIN JOURNAL OF SOCIOLOGY, 15-24.

Smelser, N. J. (1968). *Personality and the explanation of political phenomena at the social-system level: A methodological statement*. Journal of Social Issues, 24(3), 111–125.

Suhardono, Wisnu. 2015. *Konflik Dan Resolusi*, (Jurnal Sosial dan Syar'i, Vol 2 No.1 Juni)

Tim pengkajian Hukum tentang Sistem Pembinaan Narapidana Berdasarkan Prinsip *Restorative justice*. 2012. *Laporan Tim pengkajian Hukum*

SKRIPSI

Prakoso, Gilang Reno. 2017. Skripsi Tentang *Optimalisasi penyelidikan Intelejen dalam penanggulangan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum polsek purwokerto timur*: Semarang: Akademi Kepolisian.

INTERNET

<https://joglosemarnews.com/2021/01/7-kasus-bentrokan-dan-pertikaian-antar-perguruan-silat-nodai-kedamaian-karanganyar-selama-2020-kapolres-ungkap-rata-rata-pemicunya-hanya-sepele-membela-teman-tanpa-lihat-salah-benar/?singlepage=1>

<https://www.solopos.com/12-perguruan-silat-teken-komitmen-jaga-karanganyar-tetap-kondusif-1170741>

<https://joglosemarnews.com/2021/01/7-kasus-bentrokan-dan-pertikaian-antar-perguruan-silat-nodai-kedamaian-karanganyar-selama-2020-kapolres-ungkap-rata-rata-pemicunya-hanya-sepele-membela-teman-tanpa-lihat-salah-benar/?singlepage=1>

<https://joglosemarnews.com/2019/12/kronologi-bentrokan-berdarah-2-kelompok-perguruan-silat-psht-di-mojogedang-karanganyar-awalnya-joget-jogetan-akhirnya-malah-gontok-gontokan/?singlepage=1>

<https://httpafrialdyagungperdana.wordpress.com/2017/08/24/peran-intelijen-keamanan-dalam-melakukan-deteksi-dini-terhadap-perkembangan-gangguan-kamtibmas-guna-mewujudkan-kamtibmas/#:~:text=Deteksi%20dini%20ini%20merupakan%20langkah,bertanggung%20jawab%20dalam%20keamanan%20nasional>

https://elearning.menlhk.go.id/pluginfile.php/849/mod_resource/content/1/penyebab_konflik.html

<https://www.readcube.com/articles/10.2139%2Fssrn.2552360>

https://toolsfortransformation.net/indonesia/wp-content/uploads/2017/05/Resolusi-Konflik_ADR-2.pdf

<https://www.psikologimultitalent.com/2015/10/pengertian-dan-teori-perilaku-kolektif.html>